



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2025-202G



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkah dan Rahmat-Nya Rencana Strategi dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau yang disusun berdasarkan pedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan arah dan pedoman untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini merupakan hasil penyempurnaan dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dan tindak lanjut bagi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini memiliki pengaruh pada keberhasilan capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro dalam mencapai tujuan dan menunjang pengambilan kebijakan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dan mengiringi upaya kita dalam melakukan tugas pengabdian kepada daerah, masyarakat, bangsa dan negara.

Sanggau, 19 Agustus 2025



Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau,

SY. IBNU MARWAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660221 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I- 1
1.1 Latar Belakang.....	I- 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I- 2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I- 7
1.4 Sistematika Penulisan.....	I- 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SANGGAU ..	II- 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau....	II- 1
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	II- 1
2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	II- 3
2.1.3 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	II- 9
2.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	II- 16
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	II- 42
2.1.6 Mitra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.....	II- 42
2.1.7 Kerjasama Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	II- 42
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.....	II- 43
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	II- 43

2.2.2 Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	II- 46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III- 1
3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	III- 2
3.2 Sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	III- 2
3.3 Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.....	III- 4
3.4 Arah Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	III- 8
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV- 1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau....	IV- 1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV- 56
BAB V PENUTUP	V- 1
5.1 Kesimpulan	V- 1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V- 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025.....	I- 11
Tabel 2. 2 DATA PEGAWAI HONORER (KONTRAK) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025.....	II-12
Tabel 2. 3 KONDISI BEBERAPA SARANA ATAU INVENTARIS PENUNJANG KERJA PADA DINAS PERINDAGKOP. DAN USAHA MIKRO KAB. SANGGAU TAHUN 2025.....	II-14
Tabel 2. 4 ASET YANG DIMILIKI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025	II-15
Tabel 2. 5 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL FORMAL KABUPATEN SANGGAU.....	II-18
Tabel 2. 6 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL NON FORMAL KABUPATEN SANGGAU.....	II-19
Tabel 2. 7 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH KABUPATEN SANGGAU.....	II-20
Tabel 2. 8 DATA PELAKU USAHA SEKTOR PERDAGANGAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024.....	II-22
Tabel 2. 9 DATA SARANA PERDAGANGAN MENURUT JENISNYA DI KABUPATEN SANGGAU.....	II-23
Tabel 2. 10 DATA PEMASARAN EKSPOR DAN NEGARA TUJUAN TAHUN 2024.....	II-24
Tabel 2. 11 DATA ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024	II-25
Tabel 2. 12 DATA SEBARAN KOPERASI BERDASARKAN KECAMATAN TAHUN 2024.....	II-27
Tabel 2. 13 KOPERASI MENURUT JENIS KOPERASI USAHA TAHUN 2024 KABUPATEN SANGGAU.....	II-28
Tabel 2. 14 DATA KOPERASI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SANGGAU	II-29
Tabel 2. 15 REKAPITULASI DATA USAHA MIKRO TAHUN 2024 DI KABUPATEN SANGGAU.....	II-31
Tabel 2. 16 REKAPITULASI DATA USAHA KECIL TAHUN 2024 DI KABUPATEN SANGGAU.....	II-32
Tabel 2. 17 REKAPITULASI DATA USAHA MENENGAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN SANGGAU.....	II-33
Tabel 2. 18 DATA PEDAGANG KAKILIMA (PKL) DAN ASONGAN KECAMATAN TAHUN 2024.....	II-35

Tabel 2. 19 DATA BANGUNAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024	I-36
Tabel 2. 20 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019-2024.....	II-37
Tabel 2. 21 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSRIAN PERDANGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU.....	II-41
Tabel 2. 22 Rekapitulasi Hasil Telaahan Isu Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	II-60
Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan, Sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro	III- 3
Tabel 3. 2 Penahapan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	III- 6
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau 2025-2029	III- 9
Tabel 3. 4 Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	III- 11
Tabel 4. 1 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029.....	IV- 2
Tabel 4. 2 INDIKATOR, TARGET DAN RENCANA PENDANAAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025- 2029.....	IV- 29
Tabel 4. 3 Daftar Program / Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	IV- 51
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sanggau Tahun 2025-2029.....	IV- 57
Tabel 4. 5 Indikator, Target dan Rencana Pendanaan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029	IV- 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD.....	I- 1
Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	III- 1

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Industri terhadap PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2019 - 2024.....	I- 44
Grafik 2. 2 Perbandingan Pertumbuhan Industri terhadap PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024	II- 44
Grafik 2. 3 Nilai Ekspor Kabupaten Sanggau Tahun 2020 – 2024.....	II- 45
Grafik 2. 4 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Sanggau Tahun 2020 – 2024	II- 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah salah satu instrumen yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja suatu instansi pemerintah selama periode lima tahun, yang telah melalui proses penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan. Selain itu Rencana Strategis ini disusun untuk memberikan kontribusi bagi penyempurnaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Penyusunan Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan, yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro merupakan salah satu kekuatan riil didalam pelaksanaan pembangunan kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Kabupaten Sanggau. Perkembangan Industri perdagangan koperasi dan usaha mikro tersebut merupakan hasil nyata dari komitmen pembangunan daerah yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya. Industri perdagangan koperasi dan usaha mikro diberikan peluang yang cukup menjanjikan di dalam menjalankan usahanya, bahkan diberikan kesempatan untuk dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan menguntungkan. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki peran yang cukup penting didalam upaya mewujudkan peningkatan dan pengembangan usaha Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan tujuan untuk memantapkan peran usaha Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pengembangan kelembagaan, membuka kesempatan usaha yang seluas-luasnya, meningkatkan kemampuan didalam pemanfaatan sumber daya produktif, mengembangkan sikap kewirausahaan dan menumbuhkan wirausaha baru, serta meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen.

Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat bermanfaat sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan perekonomian daerah, khususnya didalam pengembangan dan peningkatan usaha di bidang perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro. Renstra ini juga diharapkan dapat menterjemahkan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian sasaran pembangunan perekonomian daerah, khususnya di bidang perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) agar ditambahkan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); agar ditambahkan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 agar ditambahkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Dan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;

31. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025 – 2029 menjadi tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menterjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten selama periode 5 (lima) tahun;
2. Menjamin tercapainya penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten secara efektif dan efisien;
3. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
4. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi, sehingga terbangun suatu sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel;

5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan Usaha Mikro.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU

- 2.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau
 - 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau
 - 2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau
 - 2.1.3 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau
 - 2.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau
 - 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

- 2.1.6 Mitra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau
- 2.1.7 Kerjasama Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau
 - 2.2.1 Permasalahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau
 - 2.2.2 Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

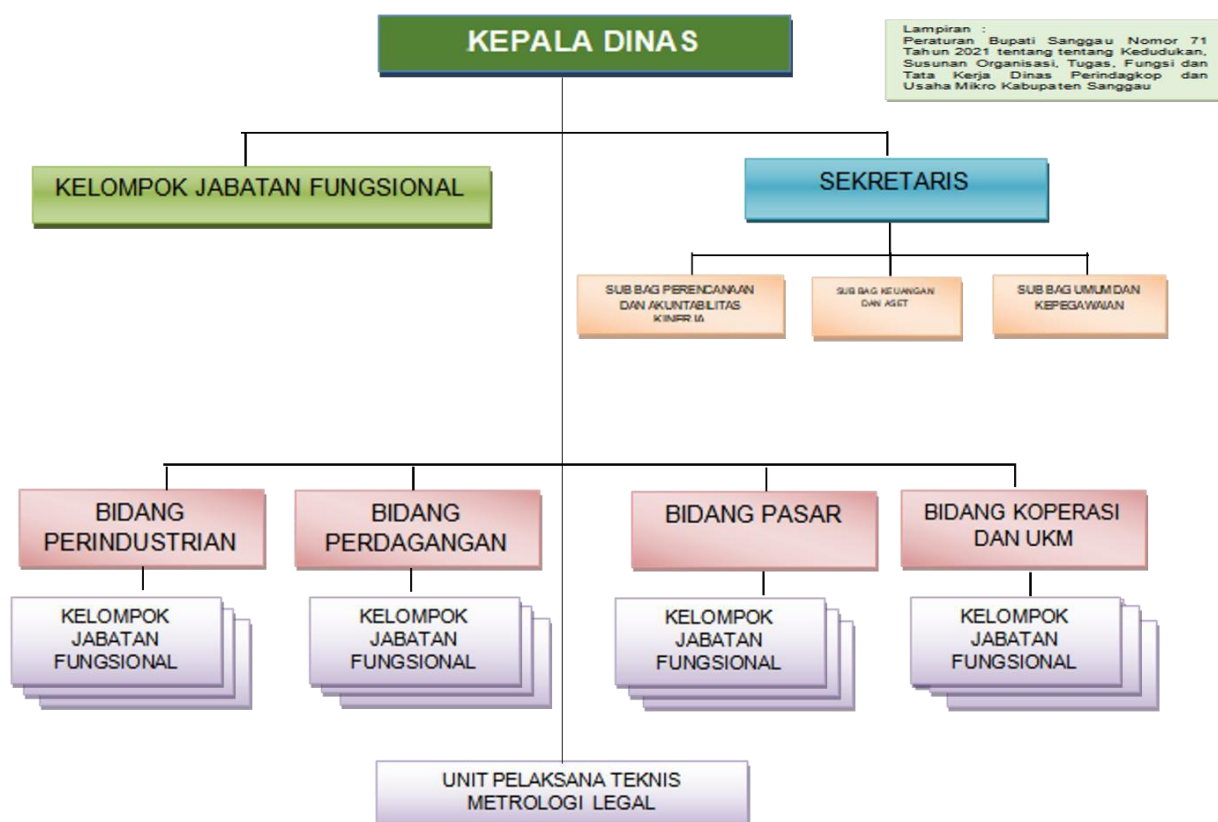
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

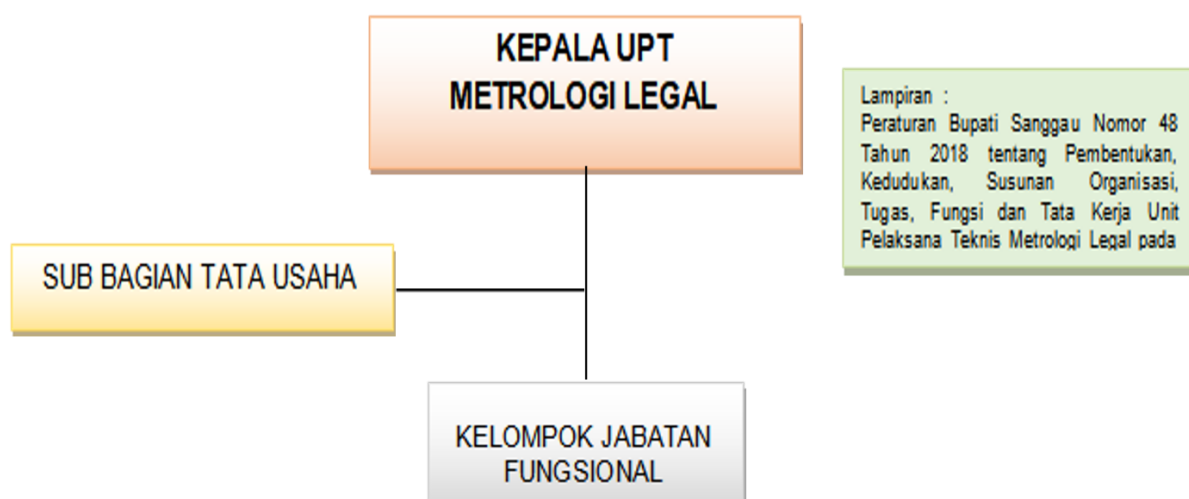
Sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau No. 71 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari Kepala Dinas dibantu Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang dipaparkan pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2, seperti berikut ini:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perindustrian membawahi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, yaitu :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perdagangan membawahi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, yaitu :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, yaitu :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pasar membawahi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, yaitu :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau



2.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

2.1.2.1 Umum

Sesuai Peraturan Bupati Sanggau Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro berfungsi :

- 1) Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 4) Pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,

dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan Dinas yang membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Aset.

Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
- 3) Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan dinas;
- 4) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 5) Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 6) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- 7) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 8) Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- 9) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- 10) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 11) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
- 12) Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

- 13) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- 14) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- 15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri, pembinaan usaha industri, dan pendataan dan pelaporan informasi industri serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perindustrian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Perindustrian diberikan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- 3) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- 6) Pelaksanaan administrasi bidang perindustrian; dan

- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2.4 Bidang Perdagangan

Sebagaimana bidang Perindustrian, bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- 3) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- 6) Pelaksanaan administrasi bidang perdagangan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2.5 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan

simpan pinjam serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang koperasi dan usaha mikro.

Dalam pelaksanaan tugas seperti tersebut di atas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
- 3) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
- 6) Pelaksanaan administrasi bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2.6 Bidang Pasar

Sebagai salah satu bidang Teknis yang juga langsung dibawah Kepala Dinas, bidang Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang pasar. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, bidang Pasar diberikan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- 3) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- 6) Pelaksanaan administrasi bidang pasar; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2.7 UPTD Kemetrolagian

Selanjutnya untuk membantu operasional teknis tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau , yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2018, dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan metrologi;
- 2) Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan tera bagi pelaku usaha;
- 3) Melaksanakan pelayanan tera dan / tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- 4) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi;
- 5) Melaksanakan pembinaan operasional reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

- 6) Melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Sistem Internasional;
- 7) Melaksanakan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Sistem Internasional;
- 8) Melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan instalasi uji;
- 9) Melaksanakan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- 10) Melaksanakan operasional terpadu penindakan pelanggaran dibidang metrologi;
- 11) Melaksanakan pembinaan produsen dan importir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- 12) Melaksanakan kajian rekomendasi izin dan/atau perpanjangan izin tipe dan tanda pabrik, serta izin reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Adapun UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi pelayanan tera / tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta penyuluhan dan pengawasan kemetrologian.

2.1.3 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah mulai dari sumberdaya, sarana, prasarana kerja serta anggaran belum banyak yang bisa dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UM. Adapun gambaran sumber daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

2.1.3.1 Kepegawaian

Pegawai merupakan unsur pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Kekuatan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan

pencapaian tujuan organisasi. Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sebanyak = 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang, yang terdiri golongan IV sebanyak = 6 orang, Golongan III = 21 orang, Golongan II = 1 orang. Golongan IX = 5 orang dan Golongan V = 4 orang. Selanjutnya bila dilihat dari tingkatan pendidikan adalah sebagai berikut : berpendidikan S2 sebanyak = 5 orang, S1 sebanyak = 22 orang, SMA / sederajat sebanyak = 9 Orang, sedangkan yang berpendidikan SD/sederajat sebanyak 1 Orang, dan dibantu oleh 19 orang Tenaga Kontrak yang terdiri dari 11 orang tenaga kontrak umum dan 8 orang tenaga Sekuriti (satpam) dibantu oleh 2 orang Petugas Pendamping Koperasi dan UMKM dan 3 orang PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan). Bila dilihat dari jumlah pegawai yang ada, masih dirasa kurang, karena berbagai jabatan (khususnya) non struktural, seperti pengetik, pengumpul dan pengolah data masih banyak dirangkap oleh pegawai yang ada. Jumlah pegawai ideal pada Dinas Perindagkop. dan Usaha Mikro berdasarkan analisis jabatan yang telah dilaksanakan sebelumnya adalah 69 (Enam Puluh Sembilan) orang. Namun demikian pimpinan terus berupaya untuk memaksimalkan pegawai yang ada dengan cara memberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada semua pegawai yang ada. *seperti pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini :*

Tabel 2. 1
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah (SKPD)	Tingkat Pendidikan	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Disperindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	S 2	Pembina Utama Muda	IV / c	1
			Pembina Tk.I	IV / b	1
			Pembina	IV / a	1
			Penata Tk. I	III / d	1
			Penata	III / c	1
		S 1	Pembina	IV / a	3
			Penata Tk. I	III / d	4
			Penata	III / c	5
			Penata Muda Tk.I	III / b	4
			Penata Muda	III / a	1
				IX	5
		SLTA	Penata Muda Tk. I	III / b	1
			Penata Muda	III / a	4
				V	4
		SD	Pengatur Muda	II / a	1
Jumlah					37

Tabel 2. 2
DATA PEGAWAI HONORER (KONTRAK) DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2025

No	Perangkat Daerah (SKPD)	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Disperindagkop dan UM Kabupaten Sanggau	S 1	3	Staf
		D III	1	Staf
		SLTA / Sederajat	6	Staf
		SD / Sederajat	1	Staf
		D III	1	Sekuriti / Satpam
		SLTA / Sederajat	6	Sekuriti / Satpam
		SLTP/ Sederajat	1	Sekuriti / Satpam
		S 1	2	Petugas Pendamping Koperasi dan UMKM
		S 1	3	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan
Jumlah			24	

Keterangan :

Tenaga Honorer (Kontrak)

- 2 Orang Sekuriti / Satpam Dekranasda
- 2 Orang Petugas Jaga Kantor dan Petugas Kebersihan Dekranasda

2.1.3.1 Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam rangka mendukung kinerja aparatur, keberadaan sarana dan prasarana kerja yang memadai sangat dibutuhkan. Secara umum keberadaan sarana dan prasarana kerja belum dapat dikatakan memadai.

Beberapa sarana dan prasarana kerja masih dirasa kurang dan dalam kondisi yang kurang baik, seperti : kendaraan operasional roda dua, komputer, Selain itu belum tersedianya Bangunan untuk penyimpanan peralatan Metrologi dan masih menggunakan bangunan yang ada. Kondisi beberapa sarana atau inventaris penunjang kerja yang sangat berpengaruh pada pelayanan dan pelaksanaan administrasi. *seperti pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 berikut ini :*

Tabel 2. 3
KONDISI BEBERAPA SARANA ATAU INVENTARIS PENUNJANG KERJA PADA
DINAS PERINDAGKOP. DAN USAHA MIKRO KAB. SANGGAU TAHUN 2025

No.	Nama Inventaris	Tahun Pengadaan	Jumlah (Unit)	Kondisi	Ket
1.	Kendaraan Roda 4	2016 2019	1 1	Rusak Berat Baik	
2.	Kendaraan Roda 2	< 2002 2003-2009 2012 2013 2014 2016 2017	14 5 2 8 1 5 1	Rusak Berat Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Diusulkan Lelang
3.	Komputer	2006 2008 2009 2012 2013 2017	2 1 1 4 8 2	Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Usulan penghapusan
4.	Laptop	< 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022 2023	9 1 1 2 10 2 2 5 2 3 1	Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	
5.	Mesin Ketik	2002-2005 2006 2009	2 2 1	Kurang Baik Baik Baik	
6.	Printer	2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014-2015 2016 2017 2020	9 4 1 9 5 7 1 2 2	Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	
7.	Kamera Digital	< 2008 2014 2016	4 1 1	Rusak Berat Kurang Baik Kurang Baik	
8.	Handy Camp	2014	1	Kurang Baik	

**Tabel 2. 4 ASET YANG DIMILIKI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025**

No.	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	01	01	TANAH	14	4,933,153,422,9
2	02		PERALATAN DAN MESIN	433	4.486.112.500,96
		01	Alat Besar	-	0,00
		02	Alat Angkut	31	1.520.218.877,84
		03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00
		04	Alat Pertanian / Peternakan	1	620.216.192,00
		05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	274	882.230.023,00
		06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	34	90.909.697,00
		07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3	6.684.149,00
		08	Alat Laboratorium	7	732.898.167,00
		09	Alat Persenjataan	-	0,00
		10	Komputer	80	631.955.395,12
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	35	31.661.576.496,46
		01	Bangunan Gedung	35	31.661.576.496,46
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4	93.379.003,27
		03	Instalasi	4	93.379.003,27
5	05		ASET TETAP LAINNYA		0,00
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	0,00
			JUMLAH ASET TETAP NILAI PEROLEHAN	-	41.197.734.023,69
			Akumulasi Penyusutan	-	(19.740.782.873,07
			JUMLAH ASET TETAP NILAI BUKU	-	21.458.951.140,62
7	07		ASET LAINNYA	1	173.000.000,00
		01	Aset Tak Berwujud	-	0,00
		02	Aset Lain-lain	1	173.000.000,00
		03	Amortisasi	-	(0.00)
		04	Penyusutan Aset Lain-lain	-	(137.000.000,00)
TOTAL				492	21.456.951.149,62

2.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindagkop. dan Usaha Mikro merupakan salah satu SKPD yang mempunyai tugas pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pelaku bisnis yang bergerak di berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, industri, jasa dan aneka usaha yang umumnya masih berskala usaha mikro. Disamping itu juga pelayanan dan pemberdayaan terhadap koperasi yang merupakan kumpulan orang dan badan usaha.

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Perangkat Daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah telah banyak yang bisa dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau. Adapun gambaran beberapa capaian hasil pembinaan dan pelayanan tersebut sebagai berikut:

2.1.4.1 Bidang Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu sektor penting yang dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan perekonomian daerah. Pembinaan terhadap sektor industri di Kabupaten Sanggau diarahkan pada industri kecil/rumah tangga, dan industri menengah. Sesuai dukungan anggaran yang tersedia beberapa program pengembangan industri di Kabupaten Sanggau telah dilaksanakan, dan akan terus dilanjutkan, seiring dengan program-program terobosan baru baik melalui APBD maupun APBN (tugas pembantuan), seperti : program Perencanaan dan Pembangunan Industri akan tetap difokuskan pada : Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Bila dilihat dari jumlah usaha industri di Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2024 terdapat 1282 industri kecil formal, 425 industri kecil non formal, dan 81 industri Menengah, dengan berbagai jenis usaha seperti kerajinan, makanan dan minuman, meubel, pandai besi, industri

olahan hasil pertanian dan perkebunan, dan lain-lain yang keseluruhannya merupakan industri potensial dan memberikan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja.

Proses produksi industri di Kabupaten Sanggau secara umum masih dilakukan secara sederhana, meskipun demikian banyak hasil-hasil produksi olahan yang telah dilakukan secara semi mekanis dan mekanis dan memiliki nilai jual yang tinggi. Data perkembangan industri kecil, dan menengah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, *seperti pada table 2.5, tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut ini :*

**Tabel 2. 5 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL FORMAL
KABUPATEN SANGGAU**

No.	Kecamatan	Tahun		
		2022	2023	2024
1	BALAI	28	38	44
2	BEDUAI	6	7	11
3	BONTI	10	16	18
4	ENTIKONG	30	35	36
5	JANGKANG	7	15	22
6	KAPUAS	299	400	483
7	KEMBAYAN	49	102	123
8	MELIAU	29	100	109
9	MUKOK	28	33	37
10	NOYAN	6	8	9
11	PARINDU	67	89	100
12	SEKAYAM	65	90	102
13	TAYAN HILIR	46	90	105
14	TAYAN HULU	35	48	54
15	TOBA	16	20	29
Jumlah		721	1091	1282

Sumber Data Directory Industri Kecil Menengah Kabupaten Sanggau Tahun 2024

**Tabel 2. 6 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL NON FORMAL
KABUPATEN SANGGAU**

No.	Kecamatan	Tahun		
		2022	2023	2024
1	BALAI	10	10	10
2	BEDUAI	7	7	7
3	BONTI	13	14	15
4	ENTIKONG	7	7	8
5	JANGKANG	7	7	7
6	KAPUAS	130	137	134
7	KEMBAYAN	54	54	53
8	MELIAU	13	13	13
9	MUKOK	19	19	18
10	NOYAN	9	9	9
11	PARINDU	46	47	48
12	SEKAYAM	19	21	21
13	TAYAN HILIR	49	49	49
14	TAYAN HULU	19	19	19
15	TOBA	16	16	16
Jumlah		418	429	425

Sumber Data Directory Industri Kecil Menengah Kabupaten Sanggau Tahun 2024

**Tabel 2. 7 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH
KABUPATEN SANGGAU**

No.	Kecamatan	Tahun		
		2022	2023	2024
1	BALAI	1	2	2
2	BEDUAI	-	1	1
3	BONTI	1	1	1
4	ENTIKONG	1	1	1
5	JANGKANG	1	1	1
6	KAPUAS	9	25	30
7	KEMBAYAN	-	3	5
8	MELIAU	1	1	3
9	MUKOK	1	2	2
10	NOYAN	-	-	
11	PARINDU	2	5	5
12	SEKAYAM	5	8	9
13	TAYAN HILIR	7	11	15
14	TAYAN HULU	1	4	5
15	TOBA	1	1	1
Jumlah		31	66	81

Sumber Data Directory Industri Kecil Menengah Kabupaten Sanggau Tahun 2024

2.1.4.2 Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan merupakan sektor yang banyak berperan dalam rangka kelancaran pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen termasuk arus barang dari dan ke luar negeri (ekspor dan import) Melalui arus perdagangan juga diharapkan dapat menjaga kestabilan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, melalui peran pedagang-pedagang kecil, menengah dan pedagang besar.

2.1.4.2.1 Perdagangan

Sesuai dengan kondisi saat ini jumlah usaha sektor perdagangan di Kabupaten Sanggau berjumlah 1.684 buah yang tersebar diseluruh Kecamatan dan desa-desa,. *Seperti pada tabel 2.8*. Berdasarkan data yang ada Pasar Tradisional sebanyak 25 unit, Pasar Modern/Swalayan sebanyak 19 unit, Toko (Perdagangan Besar) sebanyak 252 unit dan Toko Tradisional / Perdagangan Eceran sebanyak 1419 unit. *Seperti pada tabel 2.9*

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan diantaranya :
 - a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan legalitas usahanya
 - b. Faktor geografis letak usaha yang tersebar dipelosok desa.
 - c. Kurangnya Sosialisasi implentasi kebijakan dari instansi terkait terhadap pelaku usaha.
 - d. Kurang sumber Daya manusia dalam mensosialisasikan kebijakan Pemerintah.
2. Upaya pemecahan permasalahan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha agar melegalkan usaha yang dikelola dengan melengkapi perizinannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Perlu adanya petugas khusus yang menangani perizinan jemput bola dalam melayani perizinan.
 - c. Diminta kepada Aparat Kecamatan/instansi terkait agar terus melaksanakan pembinaan/sosialisasi kebijakan terhadap legalitas usaha perdagangan.
 - d. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya yang dengan mengikut sertakan bimtek Usaha perdagangan.

**Tabel 2. 8 DATA PELAKU USAHA SEKTOR PERDAGANGAN KABUPATEN
SANGGAU TAHUN 2024**

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kapuas	757
2	Parindu	84
3	Toba	64
4	Balai	38
5	Tayan Hulu	110
6	Jangkang	64
7	Beduwai	15
8	Noyan	12
9	Bonti	22
10	Entikong	34
11	Mukok	65
12	Tayan Hilir	127
13	Kembayan	86
14	Meliau	126
15	Sekayam	80
Jumlah		1.684

**Tabel 2. 9 DATA SARANA PERDAGANGAN MENURUT JENISNYA DI
KABUPATEN SANGGAU**

No.	Jenis	Jumlah
1.	Pasar Tradisional	25
2.	Pasar Modern / Swalayan	19
3.	Toko (Perdagangan Besar)	252
4.	Toko Tradisional / Perdagangan Eceran	1419

2.1.4.2.2 Ekspor Import

Sebagai daerah perbatasan yang telah memiliki PPLB (Pos Perdagangan Lintas Batas), maka keberadaan Kabupaten Sanggau dinilai sangat strategis untuk kegiatan ekspor import. Berkaitan dengan itu, telah dikeluarkan Permen Perdagangan No. 56/M-DAG/ PER/12/2008 yang mengatur tentang import produk tertentu yang hanya diperbolehkan masuk lewat/melalui 5 (lima) pelabuhan laut dan bandara internasional, yaitu : pelabuhan Tj. Priok, Tj. Emas, Tj. Perak, Belawan dan pelabuhan Makasar serta bandara Soekarno-Hatta (Banten), Juanda (Surabaya), Akhmad Yani (Semarang), Polonia (Medan) dan bandara Sultan Hasanudin (Makasar).

Dengan dikeluarkannya Permendag ini sangat menyulitkan para pedagang-pedagang ekspor import yang berada di perbatasan, karena barang-barang yang biasa mereka perdagangan dilarang masuk, namun ternyata kondisi ini tidak berlaku untuk kegiatan keluar masuk barang di PPLB Entikong, karena telah memiliki dasar hukum tersendiri yaitu Border Trade Agreement yang dibuat oleh pihak Indonesia-Malaysia pada Tahun 1970 yang memperbolehkan masyarakat perbatasan untuk berbelanja tidak lebih dari RM 600 per bulan. *Seperti pada tabel 2.10*

Tabel 2. 10 DATA PEMASARAN EKSPOR DAN NEGARA TUJUAN TAHUN 2024

No.	Bulan Month	Jumlah	Nilai (US \$)	Negara Tujuan
1	Industri Olahan	90.075,9106	56.586.770,87	Jepang, Korea, Taiwan, Malaysia, India, Singapore, Estonia, United Kingdom, Australia
2	Pertanian	-	-	-
3	Bauksit	-	-	-
Jumlah		90.075,9106	56.586.770,87	

Keterangan :

Sumber data: PT. Erna Djulawati Kabupaten Sanggau

2.1.4.2.3 Perusahaan Aktif Pemilik API UP

Untuk tertib administrasi dan penegakan aturan dari implementasi Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 yaitu Penerapan saksi antara lain :

- API dibekukan apabila tidak melaksanakan Pendaftaran ulang dan tidak melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi import dan perubahan data API
- API dicabut apabila tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi import atau tidak melaksanakan pelaporan perubahan data paling lama 30 Hari sejak Tanggal pembekuan.
- Menyampaikan informasi atau data yang tidak valid dalam dokumen
- Tidak bertanggungjawab terhadap barang yang diimport.
- Melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Impor.

2.1.4.2.4 Kemetrolagian

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML), dan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 66/M-DAG/PER/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013 tentang Tanda Tera Tahun 2015. dari data yang ada *seperti pada tabel 2.11* masih banyak alat ukur timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang belum mengikuti pelayanan tera ulang dikarenakan :

1. Pemilik UTTP belum memahami pentingnya ikut pelayann tera-tera ulang.
2. Letak geografis yang jauh dari tempat pelayanan tera-tera ulang.

3. SDM dari Metrologi yang kurang sehingga tidak semua kecamatan dapat dijangkau.
4. Dana dari penyelenggara teta-tera ulang yang terbatas.

Dari hasil keterangan diatas Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sudah dapat melaksanakan Kegiatan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi, tujuan utamanya untuk menjamin kepastian hukum dalam hal kebenaran hasil pengukuran dan juga melindungi konsumen atau kepentingan umum.

Sesuai UU No. 23 tahun 2015 Halaman 140 Sub Urusanan Standarlisasi dan Perlindungan Konsumen, Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera ulang dan pengawasan kemetrolagian dilakukan oleh daerah Kabupaten / Kota dan Daerah Kabupaten / Kota wajib memberikan pelayanan tera, tera ulang UTTP dan melakukan pengawasan UTTP, BDKT serta satuan SI.

Tabel 2. 11 DATA ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

No.	UTTP yang ditera/tera ulang	UTTP		
		Yang Ditera/Tera Ulang	Belum Ditera/Tera Ulang	Jumlah UTTP
1	Dispenser	81	92	173
2	Tangki BBM	0	87	87
6	Timbangan Jembatan	34	66	100
7	Timbangan Pasar	67	1.389	1.456
Jumlah		182	1.634	1.816

Sumber data Bidang Perdagangan Per Desember 2024

2.1.4.3 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

2.1.4.3.1 Koperasi

Koperasi sebagai salah satu badan usaha maupun gerakan ekonomi rakyat memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Melalui kegiatan usahanya koperasi memberikan pelayanan kepada anggota maupun masyarakat sebagai bagian kontribusinya dalam pembangunan ekonomi.

Sebagai salah satu lembaga keuangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sanggau, lembaga koperasi mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sampai akhir tahun 2024 jumlah koperasi di Kabupaten Sanggau tercatat sebanyak 495 koperasi. Ada dua catatan penting tahun 2014 berkenaan aturan perkoperasian. Pertama UU nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui uji materi pada tanggal 28 Mei 2014. Kedua, melalui UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam Pengesahan Akte Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi serta pengumuman pada Berita Negara menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Dari 495 unit Koperasi, tidak semuanya termasuk kategori koperasi aktif. Koperasi tidak aktif tercatat ada 166 unit dan ada 329 unit Koperasi aktif. Dari 329 unit Koperasi aktif tersebut, yang melaksanakan RAT Tahun Buku 2024 ada 92 unit Koperasi. Penyebaran koperasi berdasarkan kecamatan , *seperti pada tabel 2.12, tabel 2.13, dan tabel 2.14*

Tabel 2. 12 DATA SEBARAN KOPERASI BERDASARKAN KECAMATAN TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Total Koperasi	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	Melaksanakan RAT
1	Kapuas	145	78	67	30
2	Parindu	38	29	9	9
3	Mukok	28	22	6	3
4	Jangkang	14	5	9	-
5	Bonti	12	8	4	1
6	Meliau	51	40	11	13
7	Tayan Hulu	53	40	13	13
8	Balai	12	7	5	1
9	Tayan Hilir	38	31	7	6
10	Toba	16	12	4	5
11	Kembayan	30	23	7	3
12	Beduwai	7	4	3	1
13	Noyan	7	4	3	2
14	Sekayam	36	22	14	4
15	Entikong	8	4	4	1
Jumlah		495	329	166	92

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2024

**Tabel 2. 13 KOPERASI MENURUT JENIS KOPERASI USAHA TAHUN 2024
KABUPATEN SANGGAU**

No.	Kecamatan	Jenis Usaha					Jumlah
		PRODUS EN	KONSUM EN	PEMASA RAN	JASA	SIMPAN PINJAM	
1	Kapuas	40	84	5	9	7	145
2	Parindu	29	6	0	2	0	37
3	Mukok	21	5	0	1	1	28
4	Jangkang	6	5	1	2	0	14
5	Bonti	8	1	0	2	1	12
6	Meliau	34	14	0	2	1	51
7	Tayan Hulu	36	12	4	1	0	53
8	Balai	9	1	0	1	1	12
9	Tayan Hilir	22	13	0	2	0	37
10	Toba	6	7	1	1	1	16
11	Kembayan	16	12	1	1	0	30
12	Beduawai	5	1	0	1	0	7
13	Noyan	4	2	0	1	0	7
14	Sekayam	12	21	0	2	1	36
15	Entikong	2	6	0	0	0	8
Jumlah		249	191	12	28	13	493

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2024

Tabel 2. 14 DATA KOPERASI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SANGGAU

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	456	481	495
2	Koperasi Aktif	290	315	329
3	Koperasi Tidak Aktif	166	166	166
4	Telah RAT	89	85	92
5	Jumlah Anggota	40.743	42.478	42.335
6	Modal Sendiri	111.121.582.234,00	122.580.397.909,00	204.029.643.328,00
7	Modal Luar	200.021.555.052.00	207.115.595.043.00	379.409.938.366.00
8	Volume Usaha	130.587.081.811,00	133.373.883.288,00	696.830.437.155,00
9	SHU	46.665.997.464,00	32.562.608.524,00	29.747.220.773,00
10	Aset	311.143.096.543,00	329.695.992.952,00	584.300.602.904,00
11	Karyawan	250	292	278
12	Manager	7	5	4

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2024

2.1.4.3.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Jika kita lihat UMKM di Kabupaten Sanggau, cukup banyak jumlahnya. Sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai 4.062 unit usaha, Sampai dengan Desember 2024 total asset atau kekayaan bersih UMKM mencapai Rp. 103.189.339.250,- Dengan total omset atau hasil penjualan tahunan mencapai Rp. 732.986.915.000,-. Untuk lebih rinci, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk di Kabupaten Sanggau dapat kita lihat pada tabel 2.15 tabel 2.16 dan tabel 2.17

Dari tabel 2.15, Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Sanggau sampai dengan akhir tahun 2024 berjumlah 3.746 unit usaha, dengan karyawan sebanyak 749 orang, tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.770 orang, dengan total omset Rp. 70.515.915.000,- dan total asset sebanyak Rp. 103.189.339.250,- Pada tabel 2.16, Usaha Kecil yang ada di Kabupaten Sanggau sampai dengan akhir tahun 2024 berjumlah 273 unit usaha, dengan total omset Rp. 660.725.000.000,- dan total asset sebanyak Rp 0,-

Jika kita lihat pada tabel 2.17 berikut ini, Usaha Menengah yang ada di Kabupaten Sanggau sampai dengan akhir tahun 2024 berjumlah 43 unit usaha, tenaga kerja yang terserap sebanyak 1 orang dengan total omset Rp. 1.746.000.000,- dan total asset sebanyak Rp. 0,-

Tabel 2. 15 REKAPITULASI DATA USAHA MIKRO TAHUN 2024 DI KABUPATEN SANGGAU

No.	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Karyawan		Jumlah Tenaga Kerja		Jumlah Omzet (Rp.000)	Jumlah Aset (Rp.000)
			L	P	L	P		
1	Kapuas	974	66	130	305	506	1.749.040.000	1.171.054.250
2	Parindu	269	25	51	197	159	6.725.780.000	28.569.150.000
3	Mukok	166	3	22	55	110	111.360.000	23.650.000
4	Jangkang	398	-	1	21	29	9.756.850.000	17.366.110.000
5	Bonti	48	1	27	14	27	51.850.000	79.450.000
6	Meliau	185	1	-	79	63	9.272.200.000	7.689.600.000
7	Tayan Hulu	49	5	6	11	17	625.200.000	307.500.000
8	Tayan Hilir	194	2	23	10	30	9.752.000.000	1.554.500.000
9	Toba	21	29	19	28	19	1.739.000.000	786.000.000
10	Balai	88	2	-	16	18	3.273.260.000	8.288.000.000
11	Kembayan	81	-	6	35	36	299.750.000	20.500.000
12	Beduai	189	155	105	212	172	11.075.600.000	4.303.000.000
13	Sekayam	372	15	24	97	141	6.251.900.000	2.470.000.000
14	Noyan	244	2	3	14	8	1.874.925.000	7.318.235.000
15	Entikong	468	7	18	238	187	16.633.900.000	23.242.500.000
Jumlah		3746	311	438	1332	1522	70.515.915.000	103.189.339.250

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2024

Tabel 2. 16 REKAPITULASI DATA USAHA KECIL TAHUN 2024 DI KABUPATEN SANGGAU

No.	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Karyawan		Jumlah Tenaga Kerja		Jumlah Omzet (Rp.)	Jumlah Aset (Rp.)
			L	P	L	P		
1	Kapuas	105	-	-	-	-	262.500.000.000	-
2	Parindu	25	-	-	-	-	62.500.000.000	-
3	Mukok	4	-	-	-	-	10.000.000.000	-
4	Jangkang	2	-	-	-	-	5.000.000.000	-
5	Bonti	1	-	-	-	-	2.500.000.000	-
6	Meliau	8	-	-	-	-	20.000.000.000	-
7	Tayan Hulu	38	-	-	-	-	95.000.000.000	-
8	Tayan Hilir	19	-	-	-	-	4.750.000.000	-
9	Toba	-	-	-	-	-	-	-
10	Balai	14	-	-	-	-	35.000.000.000	-
11	Kembayan	13	-	-	-	-	32.500.000.000	-
12	Beduai	5	-	-	-	-	5.750.000.000	-
13	Sekayam	32	-	-	-	-	62.150.000.000	-
14	Noyan	-	-	-	-	-	-	-
15	Entikong	9	-	-	-	-	20.325.000.000	-
Jumlah		273	-	-	-	-	660.725.000.000	-

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2024

**Tabel 2. 17 REKAPITULASI DATA USAHA MENENGAH TAHUN 2024 DI
KABUPATEN SANGGAU**

No.	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Karyawan		Jumlah Tenaga Kerja		Jumlah Omzet (Rp.)	Jumlah Aset (Rp.)
			L	P	L	P		
1	Kapuas	12	-	-	-	-	319.500.000.000	-
2	Parindu	3	-	-	-	-	200.000.000.000	-
3	Mukok	5	-	-	-	-	207.500.000.000	-
4	Jangkang	-	-	-	-	-	-	-
5	Bonti	1	-	-	-	-	6.500.000.000	-
6	Meliau	5	-	-		1	225.000.000.000	-
7	Tayan Hulu	4	-	-	-	-	200.000.000.000	-
8	Tayan Hilir	6	-	-		-	300.000.000.000	-
9	Toba	-	-	-	-	-	-	-
10	Balai	-	-	-	-	-	-	-
11	Kembayan	2	-	-	-	-	100.000.000.000	-
12	Beduai	-	-	-	-	-	-	-
13	Sekayam	3	-	-	-	-	150.000.000.000	-
14	Noyan	-	-	-	-	-	-	-
15	Entikong	1	-	-	-	-	50.000.000.000	-
Jumlah		43	-	-	-	1	1.746.000.000	-

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2024

2.1.4.4 Bidang Pasar

Bidang pasar merupakan unsur pembantu Kepala Dinas untuk urusan Pasar, dengan titik berat Pedagang Kaki Lima (PKL), Sarana dan Prasarana Pasar serta Monitoring Informasi Harga kebutuhan pokok masyarakat dan Operasi Pasar. Khusus pembinaan terhadap PKL akan mendapat perhatian lebih serius, karena akan berkaitan langsung

dengan ketertiban, keindahan dan kesempatan / hak berusaha bagi setiap warga negara. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan perorangan yang melakukan penjualan barang - barang dagangan yang menggunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.

Dari hasil pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah terdata di semua Kecamatan sebanyak 433 PKL, yang mana dari jumlah tersebut Selanjutnya akan dilakukan penataan dan penguatan kelembagaannya, dan untuk penataan PKL ini akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup). Sedangkan pembangunan / rehab pasar saat ini baru dapat dilakukan di beberapa kecamatan dengan jumlah pasar yang telah direhab / dibangun diantaranya Penataan Bangunan Pasar Sentral Kecamatan Kapuas dan Penataan Bangunan Pasar Meliau Kecamatan Meliau dengan mempergunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024. sedangkan untuk lima tahun mendatang program ini akan tetap dilanjutkan terutama di kecamatan-kecamatan yang belum mendapat program dimaksud, baik melalui dana APBD maupun APBN. Data Pedagang kakilima dan asongan seperti pada tabel 2.18

Data Base Fasilitas Pasar keadaan sampai Tahun 2024 terdiri dari 25 lokasi pasar yang tersebar di 13 Kecamatan, tersedia fasilitas pasar sebanyak 1.082 unit tempat berusaha. *seperti pada tabel 2.19*

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Kabupaten Sanggau diantaranya adalah Tersedianya Fasilitas Pasar bagi dunia usaha berupa bangunan pasar sebagai tempat berusaha bagi para pedagang tradisional terutama bagi PKL yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. Sehingga pasar di Wilayah Kabupaten Sanggau tertata bersih, Rapi dan Indah dengan demikian jumlah Pedagang Kaki lima / Pedagang Asongan berkurang, dan dengan tersedianya fasilitas pasar diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau.

**Tabel 2. 18 DATA PEDAGANG KAKILIMA (PKL) DAN ASONGAN KECAMATAN
TAHUN 2024**

No.	Kecamatan	Jumlah PKL dan Asongan	Lokasi
1	Kapuas	129	Jl. Jend. A. Yani/Jend. Sudirman, Jl. Gajah Mada, Jl. Kartini, Jl. Bukit Ruan dan Jl. Dr. Setia Budi
2	Parindu	57	Pasar Parindu
3	Mukok	12	DEsa Kedukul
4	Jangkang	9	Rt.002, Rt. 003 Balai Sebut, Balai Sebut dan Engkasai
5	Bonti	3	Desa Bonti
6	Meliau	64	Komplek Pasar Minggu Meliau
7	Tayan Hulu	12	Sosok I dan Sosok II
8	Tayan Hilir	40	Pasar Kawat
9	Toba	10	Jl. Merdeka Timur, dan Jl. Trans Kalimantan
10	Balai	26	Pasar Pagi dan Pasar Batang Tarang
11	Kembayan	9	Pasar Kembayan, Pasar Rakyat Kembayan dan Tanjung Merpati Serambai
12	Beduai	18	Dusun Beduwai, Tokam, Berinang Beringin Timaga, dan Pemodis
13	Sekayam	20	Dusun Balai Karangan
14	Noyan	5	Desa Noyan
15	Entikong	19	Desa Meliau
Jumlah		433	

Sumber data Sarana dan Prasarana / Fasilitas Pasar Per Desember 2024

**Tabel 2. 19 DATA BANGUNAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024**

No.	Nama Pasar	Jumlah Pedagang				Kondisi
		Ruko	Kios	Los/Meja	Dasaran	
1	Pasar Tayan	-	9	-	-	Cukup
2	Pasar Rakyat Jangkang	-	8	-	-	Baik
3	Pasar Meliau	-	44	41	-	Cukup
4	Pasar Parindu	-	-	22	-	Rusak
5	Pasar Sentral Sanggau	-	11	109	-	Kurang
6	Pasar Sayur Barito (Sleng)	-	-	40	-	Rusak
7	Pasar Buah Rawabangun	-	30	-	-	Kurang
8	Pasar Mukok (lama)	-	12	-	-	Kurang
9	Pasar Barito	-	36	46	-	Kurang
10	Pasar Mpora Noyan	-	6	-	-	Kurang
11	Pasar Kartini	8	-	-	-	Kurang
12	Pasar Bonti	-	6	-	-	Rusak
13	Pasar Mentari	-	-	28	-	Baik
14	Pasar Rakyat Tampun Juah	-	10	96	-	Baik
15	Pasar Rakyat Jarai	-	17	183	-	Baik
16	Pasar Rakyat Mukok (Baru)	-	8	10	-	Baik
17	Pasar Rakyat Balai	-	10	20	-	Baik
18	Pasar Sayur Sosok	-	-	44	-	Baik
19	Pasar Rakyat Kembayan	-	6	51	-	Baik
20	Pasar Seroja (Kios)	-	11	-	-	Baik
21	Pasar Impres Entikong	12	-	-	-	Cukup
22	Pasar Perbatasan Entikong	-	6	-	-	Cukup
23	Pasar Pujasera	-	33	14	-	Cukup
24	Cafetaria Taman Sekayam	-	1	14	-	Baik
25	Pasar Seroja (Dasaran)	-	-	-	80	Baik
Jumlah		20	264	718	80	

Data Profil Pasar Rakyat Kabupaten Sanggau Desember 2024

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau yang telah dicapai pada periode sebelumnya. *Seperti Tabel 2.20*

**Tabel 2. 20 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019-2024**

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	PERINDUSTRIAN																		
1.	Industri Kecil Formal				410	420	430	440	450	426	434	721	1091	1282	103,90	103,33	167,67	247,95	284,89
2.	Industri Kecil Non Formal				420	430	440	450	460	551	393	418	429	425	131,19	91,40	95,00	95,33	92,39
3.	Industri menengah				40	40	40	40	40	18	21	31	66	81	45,00	52,50	77,50	165,00	202,50
B	PERDAGANGAN																		
1.	Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM)				5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	2518	3122	3422	3.810	3.509	45,78	56,76	62,22	69,27	63,80

2.	Eksport (US \$)				88.16 2.789 ,80	89.4 18.3 60,6 2	98.36 0.196 ,68	108.1 96.21 6,35	119.0 15.83 7,99	63. 10 4.2 93, 28	114 .19 2.9 87, 66	139. 443. 277, 00	52. 723 .40 3,5 5	56.5 86.7 70,8 7	71, 58	127, 71	141, 77	48,7 3	47, 55
3.	Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)				7.000	7.00 0	7.000	7.000	7.000	6.8 01	2.0 57	1.26 1	143 3	182	97, 16	29,3 9	18,0 1	20,4 7	2,6 0
4.	Pedagang Kakilima dan Asongan				400	400	400	400	400	32 7	433	433	433	433	81, 75	108, 25	108, 25	108, 25	108 ,25
5.	Bangunan Pasar Tradisional																		
	~ Ruko				25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	80, 00	80,0 0	80,0 0	80,0 0	80, 00
	~ Kios				500	500	500	500	500	49 4	254	254	264	264	98, 80	50,8 0	50,8 0	52,8 0	52, 80
	~ Meja / Los				750	750	750	750	750	89 3	704	704	718	718	119, 07	93,8 7	93,8 7	95,7 3	95, 73
\ C .	KOPERASI																		
1.	Koperasi				395	400	405	410	415	41 7	436	456	481	495	105 ,57	109, 00	112, 59	117, 32	119 ,28
2.	Koperasi Aktif				270	280	290	295	300	25 0	270	290	315	329	92, 59	96,4 3	100, 00	106, 78	109 ,67
3.	Koperasi Tidak Aktif				150	150	150	150	150	16 7	166	166	166	166	111, 33	110, 67	110, 67	110, 67	110 ,67

4.	Melaksanakan RAT				150	160	170	180	190	43	61	89	85	92	28,67	38,13	52,35	47,22	48,42
D	USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH																		
1.	Usaha Mikro				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2203	2.806	3.106	3.505	3.746	36,72	46,77	51,77	58,42	62,43
2.	Usaha Kecil				400	400	400	400	400	272	273	273	262	273	68,00	68,25	68,25	65,50	68,25
3.	Usaha Menengah				50	50	50	50	50	43	43	43	43	43	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00

2.1.4.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pencapaian Visi dan Misi suatu organisasi, karena strategi yang telah ditetapkan tidak akan bisa terlaksana dengan baik dan utuh tanpa didukung anggaran yang cukup dan memadai. Saat ini karena keterbatasan anggaran daerah, anggaran yang tersedia untuk operasional kegiatan di Dinas Perindagkop. dan Usaha Mikro juga masih dinilai terbatas, sehingga pimpinan membuat kebijakan dengan menginventarisir dan menseleksi seluruh program dan kegiatan sekretariat dan masing-masing bidang yang benar-benar mutlak dan sangat prioritas dalam rangka mendukung tujuan organisasi. Sebagai gambaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir anggaran belanja langsung Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro, dinilai belum memadai bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi serta program-program yang telah ditetapkan, secara global anggaran belanja 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2023 sebesar Rp. 10.619.420.170,00
- b. Tahun 2024 sebesar Rp. 10.063.527.421,52
- c. Tahun 2025 sebesar Rp. 11.528.884.031,65

seperti pada tabel 2.21 berikut ini :

Tabel 2. 21 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDANGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU

Uraian		Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	616.138.500	704.586.700	762.498.700	861.548.700	697.356.400	678.122.340	885.838.300	796.843.108	863.236.530	697.356.400	110,06	125,72	104,50	100,20	100,00	(0,05)	0,09
	Hasil Retribusi Daerah	616.138.500	704.586.700	762.498.700	861.548.700	697.356.400	678.122.340	885.838.300	796.843.108	863.236.530	697.356.400	110,06	125,72	104,50	100,20	100,00	(0,05)	0,09
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.724.456.455	4.648.490.196	4.823.962.467	3.955.683.653	4.046.138.027	2.683.905.177	3.433.075.482	3.677.179.935	3.428.337.264	3.630.220.575	72,06	73,85	76,23	86,67	89,72	(0,15)	0,34
	Belanja Pegawai	3.724.456.455	4.648.490.196	4.823.962.467	3.955.683.653	4.046.138.027	2.683.905.177	3.433.075.482	3.677.179.935	3.428.337.264	3.630.220.575	72,06	73,85	76,23	86,67	89,72	(0,15)	0,34
3	BELANJA LANGSUNG	3.426.510.825	7.798.949.708	12.948.270.508	6.663.736.517	5.927.389.395	3.234.507.734	6.580.619.621	12.738.037.779	6.443.885.991	5.728.949.161	94,40	84,38	98,38	96,70	96,65	0,25	0,88
	Belanja Barang dan Jasa	3.281.510.825	7.683.949.708	12.519.747.933	6.309.416.257	5.709.680.651	3.094.827.734	6.465.627.621	12.309.751.779	6.090.517.817	5.514.037.201	94,31	84,14	98,32	96,53	96,57	0,25	0,88
	Belanja Modal	145.000.000	115.000.000	428.522.575	354.320.260	217.708.744	139.680.000	114.992.000	428.286.000	353.368.173,97	214.911.960	96,33	99,99	99,94	99,73	98,72	(1,12)	1,94

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha mikro Kabupaten Sanggau berkerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti bekerjasama dengan Satpol-PP untuk penertiban pasar yang ada wilayah kota/kabupaten sanggau, dan bekerjasama dengan Dinas Perkebunan dan Perikanan tentang Koperasi Perkebunan Sawit, serta bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah di Kabupaten Sanggau.

2.1.6 Mitra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Selain kelompok sasaran perangkat daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha mikro Kabupaten Sanggau juga menjalin koordinasi dengan beberapa mitra perangkat daerah dan dengan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, organisasi, atau instansi lain, untuk mencapai tujuan bersama di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan UMKM, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.7 Kerjasama Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik antar perangkat daerah maupun mitra eksternal seperti pelaku usaha, organisasi, serta instansi terkait lainnya. Kerja sama ini diwujudkan melalui koordinasi, kolaborasi program, dan kemitraan strategis yang berfokus pada pengembangan sektor perindustrian, perdagangan,

koperasi, dan usaha mikro. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan terwujud peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, penguatan perekonomian daerah, serta tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

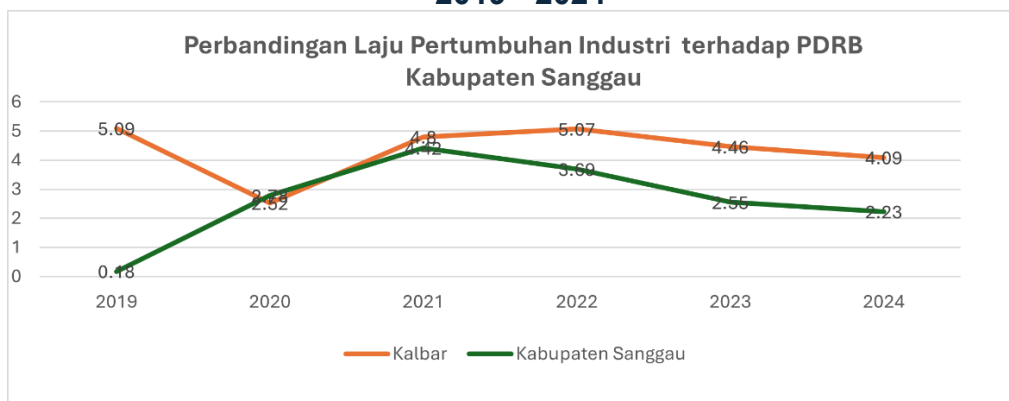
Permasalahan dan persoalan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kaupaten Sanggau, maka permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada masa periode 5 tahun sebelumnya dan memiliki dampak yang panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

2.2.1.1 Urusan Perindustrian

Sektor industri sampai dengan tahun 2024 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Sanggau. Walaupun demikian, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan pembangunan sektor industri belum begitu menggembirakan jika dilihat dari tingkat pertumbuhan dimana rata-rata laju pertumbuhan sektor industri Kabupaten Sanggau antara 2-3% yang hampir setiap tahunnya selalu dibawah rata-rata pertumbuhan Nasional, bahkan pada tahun 2024 capaian laju pertumbuhan sektor industri tidak mencapai angka 3% bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

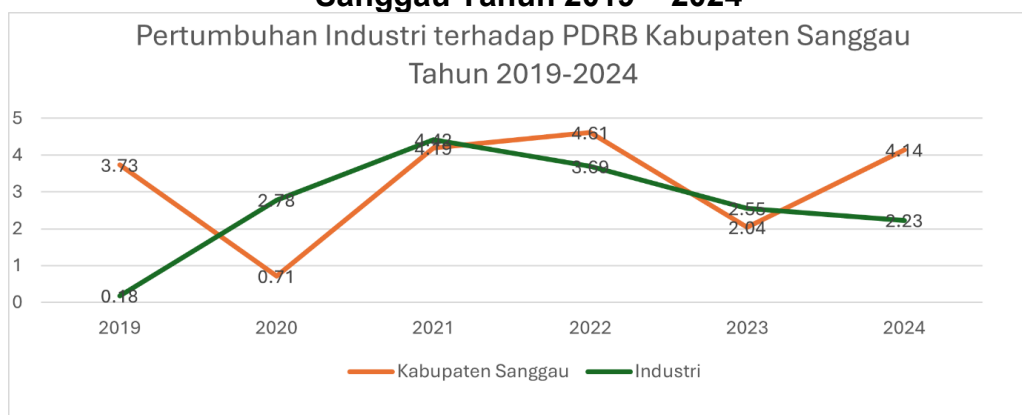
Hal tersebut dapat diartikan bahwa peran sektor industri terhadap PDRB total Kabupaten Sanggau mengalami penurunan pada Tahun 2024 dimana kontribusi sektor industri yang berada pada kisaran 2,23%. Angka tersebut sangat jauh apabila dibandingkan dengan kontribusi sektor industri pada tahun 2023 yang mencapai 2,55%.

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Industri terhadap PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2019 - 2024



Sumber : BPS Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Grafik 2. 2 Perbandingan Pertumbuhan Industri terhadap PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Dalam garis besarnya permasalahan pembangunan urusan industri sehingga menyebabkan kondisi sektor industri dimaksud disebabkan oleh :

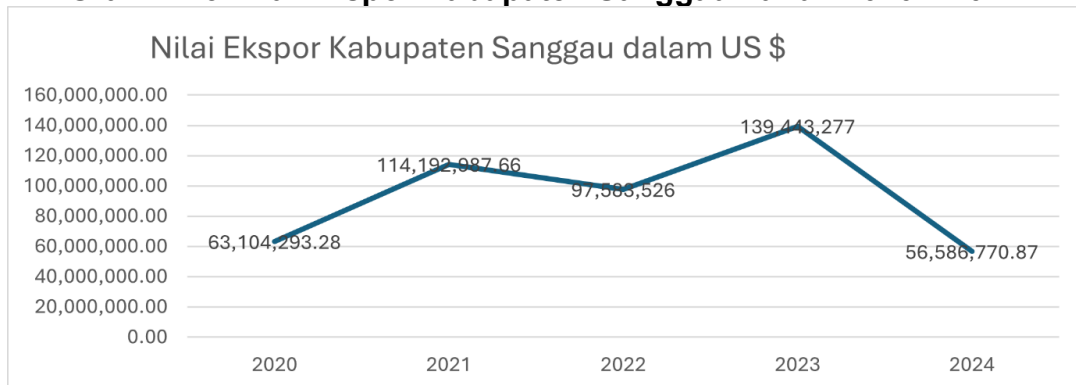
1. Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah; dan
2. Sistem pengembangan industri kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan.

2.2.1.2 Urusan Perdagangan

Secara umum pembangunan sektor perdagangan daerah dilaksanakan melalui langkah-langkah pengembangan pasar yang terintegrasi, penciptaan iklim usaha yang kompetitif, mendorong penumbuhan dan pengembangan sektor produksi perdagangan dalam dan luar negeri guna peningkatan ekspor, penciptaan tertib usaha dan upaya perlindungan konsumen. Namun yang menjadi isu penting adalah keterkaitan dengan perdagangan luar negeri.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan sub sektor perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 nilai ekspor Kabupaten Sanggau tercatat sebesar US\$ 97.583.526 dan menurun hingga mencapai US\$ 97.583.526 pada tahun 2022. Walaupun demikian, kinerja ekspor terus mengalami peningkatan yang terlihat dari peningkatan nilai ekspor dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan menjadi US\$ 56.586.770,8.

Grafik 2. 3 Nilai Ekspor Kabupaten Sanggau Tahun 2020 – 2024



Daftar Realisasi Ekspor (DLRE) PT. ERNA DJULIAWATI, Realisasi Ekspor menurut Kayu Olahan yang terdiri dari Plywood dan Fancywood

Sedangkan pada sektor perdagangan dalam negeri, pentingnya melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap kenaikan inflasi. Besarnya peranan Pemerintah Daerah turut membantu pengendalian inflasi serta kestabilan harga bahan pokok dan barang penting lainnya yang dilakukan melalui operasi pasar menjelang hari besar keagamaan, serta pemantauan rutin harga bahan pokok.

Selanjutnya permasalahan pada sektor perdagangan yang terjadi dapat berasal dari dalam maupun luar negeri terkait dengan :

1. Belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar;
2. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
3. Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor; dan
4. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Sedangkan pada pembinaan pedagang kakilima dan asongan, pentingnya dilakukan pembinaan peningkatan disiplin serta relokasi pedagang kaki lima dan asongan.

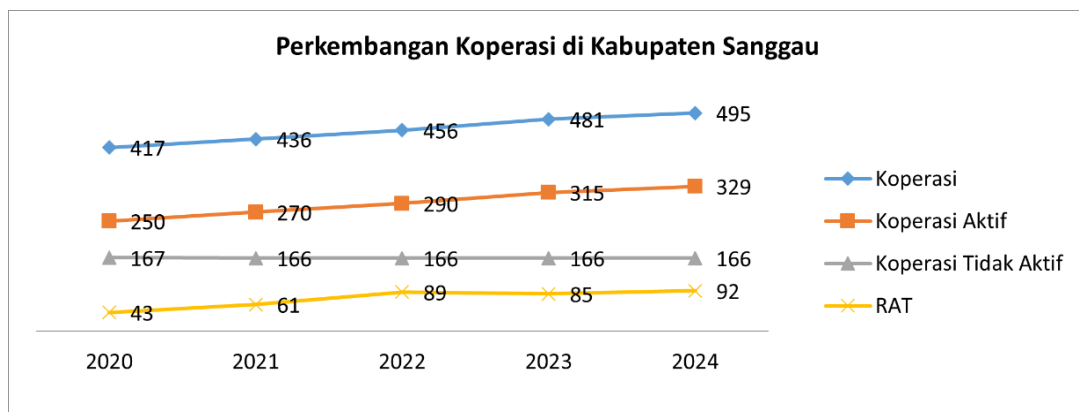
Permasalahan dititik beratkan pada Pedagang Kaki Lima (PKL), Sarana dan Prasarana Pasar. Khusus pembinaan terhadap PKL akan mendapat perhatian lebih serius, karena akan berkaitan langsung dengan ketertiban, keindahan dan kesempatan / hak berusaha bagi setiap warga negara. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan perorangan yang melakukan penjualan barang - barang dagangan yang menggunakan bagian jalan / trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.

2.2.1.3 Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bidang Koperasi , dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pembina dan pengurus koperasi serta pelaku usaha mikro; dan
2. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

Grafik 2. 4 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Sanggau Tahun 2020 – 2024



2.2.2 Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

2.2.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemerintah Kabupaten Sanggau bertekad melanjutkan mengamankan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dalam membangun Kabupaten Sanggau sebagai **“Rumah Kita”** untuk sebuah gerakan dengan mengedepankan **“Bekerja dengan Hati”** serta semangat **“Dompu”** dan **“Gotong Royong”**. Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan diwujudkan dengan menjadikan Kabupaten Sanggau untuk Indonesia yang sejati-jatinya "merdeka".

Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagai upaya agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Perumusan visi dan misi tentunya disusun dengan memperhatikan isu strategis, lingkungan strategis dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional.

Dalam menuangkan visi dan misi, juga perlu melanjutkan penguatan kepada setiap pemangku kepentingan semangat patriotisme **“SABANG MERAH”** (Sanggau Bangga Mengukir Sejarah) yang telah dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya melalui 7 (tujuh) Brand Images, yaitu: (1) Sanggau Pintar, (2) Sanggau Sehat, (3) Sanggau Bersih dan Indah, (4) Sanggau Tertib, (5) Sanggau Terang, (6) Sanggau Manjur (Maju Infrastruktur), dan (7) Sanggau Budiman (Berbudaya dan Beriman).

Dengan motto **“YOSH”** (Yakin, Optimis, Sanggau Hebat), masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki keimanan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk senantiasa optimis dalam melaksanakan pembangunan maju berkelanjutan dan berkeadilan menuju Kabupaten Sanggau yang hebat.

Visi pembangunan daerah kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2025 – 2030. Secara politis visi merupakan perwujudan dari cita-cita Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Kabupaten Sanggau yang juga menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Sanggau yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau untuk periode RPJMD tahun 2025-2029 sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“ SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN ”

Makna dari visi “Maju Berkelanjutan” menunjukkan keadaan semakin meningkatnya berbagai indikator pembangunan daerah yang telah dicapai pada periode pemerintahan yang sebelumnya. Beberapa indikator pembangunan daerah yang menjadi fokus pada masa RPJMD tahun 2025-2029 meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan

budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik secara berkesinambungan.

Makna “Berkeadilan” menunjukkan keadaan pembangunan yang merata antar wilayah dengan perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang. Kabupaten Sanggau memiliki ciri khas latar belakang budaya yang beragam karena memiliki penduduk dari berbagai jenis suku dan agama. Oleh karena itu pembangunan daerah yang dilaksanakan akan memberikan aspek keadilan bagi setiap suku dan budaya yang ada di Kabupaten Sanggau.

Misi Untuk mewujudkan Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan, diperlukan misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. Adapun misi pembangunan daerah untuk menuju Sanggau Maju Berkelanjutan Dan Berkeadilan sebagai berikut:

1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DASAR DI PERDESAAN, PERKOTAAN DAN PERBATASAN NEGARA;

Misi ini dimaksudkan melanjutkan upaya pembangunan di Kabupaten Sanggau dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dasar yang dimaksud meliputi jalan, jembatan, sistem irigasi dan sarana perhubungan. Selain itu penanganan dan penataan terhadap pemukiman kumuh juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan melalui penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di perdesaan dan perkotaan

serta daerah perbatasan yang merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena mempermudah akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang strategis karena merupakan titik perekonomian regional maupun nasional. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang ada di Kabupaten Sanggau, merupakan PLBN pertama yang ada di Kalimantan Barat. Melalui kawasan perbatasan, aktivitas perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pembangunan di kawasan perbatasan, mengingat kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkualitas diharapkan tetap berada dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Lingkungan hidup yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

2. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT;

Misi ini dimaksudkan untuk melanjutkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi dan meningkatkan investasi daerah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumber daya alam.

Kabupaten Sanggau memiliki berbagai potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai modal keunggulan dalam persaingan bagi

Kabupaten Sanggau dalam membangkitkan perekonomian masyarakat yang kuat dan tangguh serta mewujudkan peningkatan indeks daya saing daerah.

Selain potensi sumber daya alam, upaya pengembangan berbagai komoditi pangan unggulan kabupaten sanggau dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah juga diharapkan dapat menjadi akselerasi dalam mewujudkan kebijakan swasembada pangan.

3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KOMPETESI SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL

Misi ini dimaksudkan untuk melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, serta gender. kesetaraan gender dan generasi muda menjadi atensi dalam agenda pembangunan berkelanjutan global karena memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat. masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, terpenuhi kesejahteraan sosialnya memiliki daya saing dalam berperan aktif disemua bidang pembangunan.

Generasi muda merupakan aset dan harapan masa depan bangsa dalam pembangunan daerah. untuk mewujudkan generasi muda berkualitas, berkompeten, berdaya saing tinggi, adaptif, kreatif dan inovatif, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, kebijakan, maupun dukungan infrastruktur.

Dengan demikian, generasi muda akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, teknologi, serta sosial budaya di daerah, serta menjadi generasi muda yang dapat berperan aktif dan menjadi penggerak dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

4. MELESTARIKAN ADAT BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERMANFAAT

Kearifan lokal diharapkan mampu memberikan solusi dalam menjaga ekosistem alam, mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi hijau dan mengadopsi praktek budaya yang ramah lingkungan.

Misi ini memiliki maksud membangun tatanan kehidupan sosial masyarakat kabupaten sanggau melalui penguatan budaya lokal serta mensinergikan kearifan lokal kedalam progam pembangunan daerah. tata nilai budaya dan adat istiadat dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Upaya menjaga kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi pengelolaan limbah domestik yang aman, penanganan dan pengolahan sampah yang inklusif dari hulu ke hilir, upaya mitigasi bencana serta pengendalian dan pengawasan terhadap potensi polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas industri maupun aktivitas perekonomian masyarakat.

5. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mengacu pada sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan etika dan integritas pejabat publik.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN dilakukan melalui penerapan reformasi birokrasi, penguatan aparatur sipil negara, peningkatan pengawasan internal pemerintah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, optimalisasi teknologi dalam pemerintahan (E-Government) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, transparan, dan efisien, serta ASN mampu bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi serta keterbukaan informasi publik termasuk dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pengelolaan PAD dilakukan melalui upaya penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, pemberdayaan BUMD dan berbagai sektor usaha daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Dengan penerapan strategi tersebut, optimalisasi PAD akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis serta pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah yang terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik.

Pemerintahan desa di Kabupaten Sanggau merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat paling dasar. Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen memperkuat peran dan kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif, transparan, dan partisipatif. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa di Sanggau berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes), serta pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, diharapkan pemerintahan desa di Kabupaten Sanggau dapat terus berkembang menjadi pilar pembangunan yang tangguh dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

6. MENINGKATKAN HARMONISASI DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA;

Pemahaman masyarakat terhadap toleransi dan harmonisasi dapat membantu mencegah dan mengelola konflik terutama pada daerah yang memiliki masyarakat yang majemuk. Misi ini dimaksudkan mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang saling harmonis dan bertoleransi antar umat beragama dan antar suku, sebagai kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera serta saling menghormati perbedaan keyakinan. Harmonisasi mencerminkan kehidupan yang rukun dan saling mendukung antar pemeluk agama yang berbeda.

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan ***misi ke 2 (dua), yaitu : “ Meningkatkan Perekonomian Masyarakat “ dan Misi ke 5 (lima) yaitu “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Sipil Negara Yang Profesional“***

Pada misi ini terlihat peran serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau didalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka untuk ikut mendukung misi meningkatkan perekonomian masyarakat dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan aparatur sipil negara yang profesional; dengan:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan basis pemanfaatan potensi sumberdaya alam;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
3. Percepatan pengembangan wilayah perbatasan dan kawasan strategis;
4. Pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
5. Pengembangan ekonomi kreatif;
6. Promosi Produk Dalam Negeri;

7. Pelayanan di Bidang Kelembagaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi dan UMKM
8. Revitalisasi dan Pembangunan pasar
9. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
10. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan Retribusi dan Sewa Pasar.

2.2.2.2 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau membidangi 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau juga memperhatikan Renstra yang telah disusun oleh Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI., dan Menteri Koperasi.

2.2.2.2.1 Urusan Perindustrian.

Sebagai amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035. RIPIN 2015 -2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri. Visi pembangunan industri nasional adalah

“ Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh “

Industri tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.

4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam.
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi.
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri.
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI).
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan sentra Industri Kecil dan industri menengah.
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri.
8. Melakukan pembangunan industri hijau.
9. Melakukan pembangunan industri strategis.
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

2.2.2.2.2 Urusan Perdagangan.

Visi Kementerian Perdagangan 2025-2029 adalah **"Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia yang berdaya saing global dan berkelanjutan."** Visi ini menekankan pada ambisi Indonesia untuk menjadi pemain kunci dalam perdagangan global, dengan fokus pada daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar internasional, serta

memastikan pertumbuhan perdagangan yang berkelanjutan. Misi Kementerian Perdagangan 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri,
2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri, dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Perdagangan akan fokus pada tiga tujuan strategis utama:

1. Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri.
3. Terwujudnya tata kelola pelayanan perdagangan yang berkualitas, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan produktif.

2.2.2.2.3 Urusan Koperasi dan UKM

Visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) untuk periode 2025-2029, berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan RPJMN 2025-2029, serta arah kebijakan KemenKopUKM saat ini, dapat diperkirakan visi dan misi kementerian ini akan fokus pada penguatan koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, peningkatan daya saing, dan kesejahteraan pelaku usaha. Berikut adalah visi dan misi KemenKopUKM 2025-2029:

Visi

"Koperasi dan UMKM Unggul, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan Menuju Kesejahteraan Rakyat."

Misi

1. Meningkatkan Kapasitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM:
 - Penguatan kelembagaan koperasi.
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha.
 - Pengembangan produk dan inovasi.
 - Akses pembiayaan dan permodalan.
 - Pemanfaatan teknologi digital.
2. Mendorong Pertumbuhan Koperasi dan UMKM yang Inklusif dan

Berkelanjutan:

- Peningkatan akses pasar domestik dan internasional.
 - Pengembangan klaster ekonomi unggulan.
 - Penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan Ekosistem Koperasi dan UMKM yang Mendukung:
- Penyederhanaan regulasi dan birokrasi.
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - Penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
4. Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Nasional:
- Peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
 - Penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
 - Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat.

2.2.2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kesesuaian tata ruang di Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di Kabupaten Sanggau telah sesuai dengan RTRW. Namun, RTRW Kabupaten Sanggau saat ini sedang dalam proses revisi, sehingga pemanfaatan kesesuaian tata ruang kedepannya harus menyesuaikan dengan RTRW yang sedang dilakukan revisi.

Ketaatan terhadap RTRW Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan RTRW Kabupaten Sanggau terus meningkat sejak pembenahan data dan perumusan indikator yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dan dilanjutkan dengan pengawasan dan pengendalian RTRW yang lebih baik. Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Sanggau pada tahun 2019-2024 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sanggau masih mengacu dan tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Sanggau. Selain itu, penerbitan izin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah mengacu dan tidak bertentangan dengan RTRW yang telah ditetapkan.

2.2.2.3 Penentuan Isu – isu Strategis

Industri 5.0 menandai babak baru dalam revolusi industri, di mana integrasi antara teknologi canggih dan faktor manusia menjadi fokus

utama. Tidak hanya otomatisasi yang menjadi prioritas, tetapi juga kolaborasi harmonis antara manusia dan mesin. Dalam bidang sumber daya manusia (SDM), transformasi digital memainkan peran krusial untuk mendukung efisiensi organisasi, meningkatkan daya saing, dan memberikan pengalaman yang lebih bermakna. Adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan Internet of Things (IoT) menciptakan lingkungan kerja yang lebih cerdas dan terhubung. Meski demikian, perjalanan menuju transformasi digital di era Industri 5.0 tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi organisasi sangat beragam, termasuk resistensi terhadap perubahan budaya kerja serta kebutuhan untuk membekali sumber daya manusia (SDM), dengan keterampilan baru yang relevan. Perubahan cepat ini juga menuntut perhatian ekstra pada isu-isu sensitif seperti privasi data dan keamanan informasi yang semakin rentan terhadap ancaman digital. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola proses transformasi ini menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa transformasi sektor industry 4.0 ke industry 5.0 dapat menjadi peluang atau ancaman terhadap Kabupaten Sanggau. Ancaman terbesar dengan revolusi industry ini ialah Kabupaten Sanggau yang saat ini masih bertumpu terhadap industry. Sumber Daya Alam akan terancam, mengingat kecerdasan buatan yang mungkin diterapkan pada sektor-sektor tertentu akan memberikan dampak terhadap kebutuhan tenaga kerja semakin berkurang dan digantikan dengan komputer maupun mesin. Dalam perspektif sektorbisnis dan pengusaha Revolusi Industri 5.0 justru menguntungkan jangka panjang, hal tersebut dikarenakan dengan jumlah tenaga kerja yang dapat digantikan fungsi dan perannya oleh komputer.

Oleh karena itu berikut merupakan beberapa poin-poin penting sebagai bentuk persiapan Kabupaten Sanggau dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0.

Sektor UMKM dan Industri yang akan berdampak secara signifikan adalah mulai merubah mindset konvensional ke modern berbasis dengan teknologi. Hal tersebut tentunya untuk dapat bertahan

dimana dengan terbukanya pasar seluas mungkin, maka pesaing tidak hanya dari Kabupaten Sanggau, namun juga dari seluruh Indonesia bahkan manca negara. Sehingga disaat tidak dapat memanfaatkan ancaman menjadi peluang yang terjadi akan tergerus. Khususnya untuk sektor industri padat karya, sebelum berencana menggantikan SDM menjadi mesin atau teknologi setidaknya melakukan kajian terlebih dahulu sehingga menemukan titik equilibrium antara SDM dengan teknologi. Sehingga meminimalisir mengorbankan SDM khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau.

Adapun isu- isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau yang merupakan permasalahan yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2025 – 2029) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya tahun 2019-2024 dan perlu penyelesaian secara bertahap., yaitu :

1. Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah;
2. Sistem pengembangan industri kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
3. Belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar;
4. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
6. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen;
7. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia, pembinaan dan pengurus koperasi serta pelaku UMKM; dan
8. Belum optimalnya pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Tabel 2. 22 Rekapitulasi Hasil Telaahan Isu Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Potensi Daedah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan dengan Perengka t Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
- Tata Kelola Pemerintahan - Pengawasan, pembinaan, Pendidikan dan pelatiahn koperasi - Pengembangan dan pemberdayaan UMKM - Perencanaan, Pengendalian Izin Usaha, Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional - Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.	- Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah - Sistem pengembangan industri kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan. - Belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar - Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan		- Perlambatan Pertumbuha n Ekonomi Global - Potensi Resesi - Fluktuasi Harga Komoditas - Ketegangan Geopolitik - Inflas	- Ppenurunan kemiskinan, - Peningkatan kualitas sumber daya manusia - ertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan	- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, - Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan - penurunan tingkat kemiskinan	- Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah - Sistim Pengembangan industri kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan - Belum optimalnya pembenahan imfrastruktur pasar - Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan

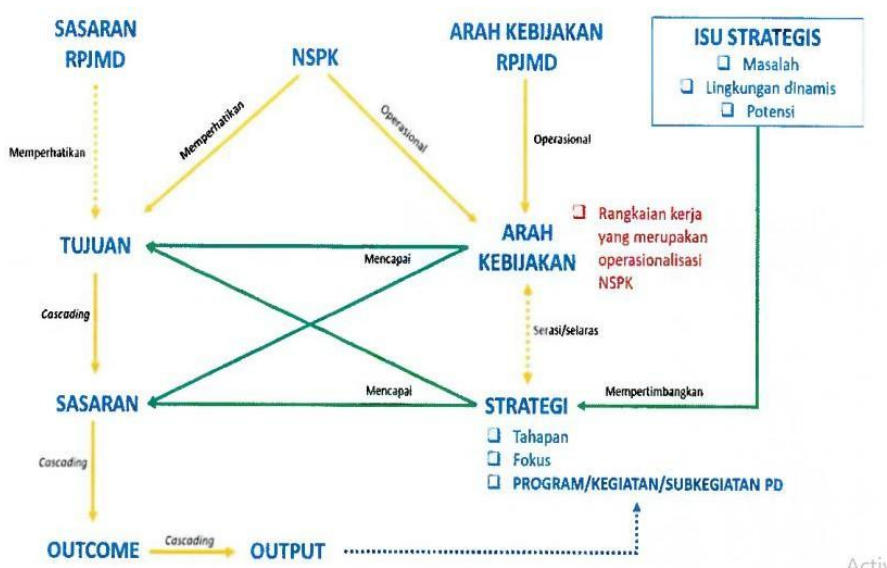
- Peningkatan Sarana dan Stabilitas Harga Barang. - Pengembangan Ekspor. - Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.	pokok dan barang penting - Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor - Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen. - Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pembina dan pengurus koperasi serta pelaku usaha mikro - Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.					pokok dan barang penting; - Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor; - Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen - Terbatasnya kualitas sumber daya manusia, pembinaan dan pengurus koperasi serta pelaku UMKM - Belum optimalnya pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
---	--	--	--	--	--	--

BAB III

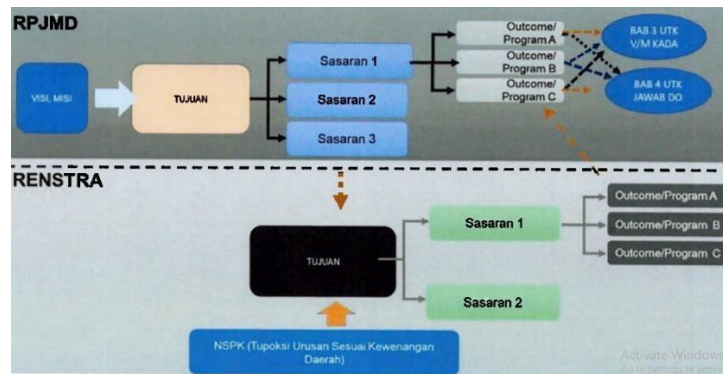
Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan tahap penting penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis PD Tahun 2025–2029. Tujuan dan sasaran yang terukur memberikan arah jelas untuk mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan. Merealisasikan tujuan jangka menengah berarti menciptakan perubahan signifikan pada dampak tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan pencapaiannya memerlukan strategi, yaitu aktualisasi kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam program-program guna mewujudkan sasaran selama 5 (lima) tahun.

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam Renstra PD digambarkan pada Gambar 3.1, sedangkan keterkaitan sasaran RPJMD dan tujuan Renstra PD ditunjukkan pada Gambar 3.2, yang memperlihatkan kesinambungan perencanaan dari tingkat daerah hingga perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD



Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Maksud dan PD



3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis“

3.2 Sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, realistis, serta dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusannya harus memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten, kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan terkait. Berpedoman pada sasaran RPJMD Kabupaten 2025–2029, ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025– 2029 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1, yaitu:

1. Meningkatnya produktivitas perindustrian dan perdagangan.
2. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3. 1
Rumusan Tujuan, Sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	Meningkatnya Produktivitas Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kabupaten Sanggau	17.30	17.47	18.22	18.96	19.71	20.45	
			Nilai perdagangan (milyar rupiah)	3,140.56	3,187.35	3,203.14	3,318.93	3,434.73	3,477.92	
		Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UM	persentase Koperasi yang Sehat	2.50	5.00	7.50	10.00	12.50	12.50	
			Volume Usaha Koperasi (milyar rupiah)	696	699	703	706	710	713	
			Persentase UM yang meningkat Omzetnya	0.93	0.95	0.98	1.02	1.07	1.13	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISPERINDAGKOP	Nilai SAKIP DISPERINDAGKOP	66.95	67.50	68.00	68.50	69.00	69.30	

3.3 Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau ini menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau. Strategi dan kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan.

Strategi jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah

Dalam penahapan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau dalam rangkai pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Penahapan Rencana Strategis
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

TAHAP 2025	TAHAP 1 2026	TAHAP 2 2027	TAHAP 3 2028	TAHAP 4 2029	TAHAP 5 2030
Konsolidasi dan Penguatan Fondasi Pembangunan Berkelanjutan	Akselerasi Infrastruktur dan Pemerataan Ekonomi	Evaluasi Tengah Periode dan Penajaman Fokus Peningkatan Perekonomian	Peningkatan Kualitas SDM dan Pelestarian Budaya & Lingkungan	Memasuki tahun kelima, pembangunan difokuskan pada konsolidasi dan penguatan hasil:	Tahun Transisi, Evaluasi Total, dan Penyiapan Arah Baru
Merupakan fase peletakan fondasi awal untuk seluruh agenda pembangunan. Fokus utama diarahkan pada: 1. Sinkronisasi dokumen perencanaan: RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD. 2. Identifikasi isu-isu strategis di sektor infrastruktur,	fokus diarahkan pada pelaksanaan program program prioritas daerah yang berdampak langsung: 1. Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi, listrik) terutama di desa dan perbatasan. 2. Revitalisasi ekonomi lokal melalui	Titik balik penting sebagai fase evaluasi dan penyesuaian: 1. Evaluasi menyeluruh pelaksanaan program RPJMD dan kinerja perangkat daerah (mid term review). 2. Penyempurnaan strategi untuk memperbaiki kinerja indikator yang belum sesuai target.	Mengarah pada pembangunan yang bersifat struktural dan berjangka panjang: 1. Program penguatan SDM melalui pendidikan, pelatihan, serta kesehatan masyarakat. 2. Perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, serta pelibatan lembaga adat.	Penguatan dampak program program unggulan kepala daerah. 1. Replikasi praktik baik dari desa, kecamatan, maupun lintas OPD. 2. Integrasi pembangunan berbasis data spasial dan realisasi anggaran. 3. Penyusunan dokumen awal	Tahun terakhir menjadi momentum evaluasi akhir sekaligus penyiapan transisi kepemimpinan daerah: 1. Evaluasi menyeluruh capaian RPJMD 2025 2030 dan Renstra perangkat daerah. 2. Dokumentasi pembelajaran pembangunan selama 6 tahun.

ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 3 pengembangan SDM dan tata kelola pemerintahan,	penguatan sektor pertanian, UMKM, dan konektivitas pasar. 3. Penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha.	3. Penyesuaian terhadap perubahan situasi: kebijakan pusat, kondisi ekonomi, perubahan iklim, atau bencana.	3. Penguatan tata kelola lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim. 4. Mendorong peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.	teknokratik RPJMD 2031 2036 sebagai bentuk kesinambungan pembangunan.	3. Penyusunan dokumen strategis sebagai dasar RPJMD berikutnya: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RPJPD, dan dokumen teknokratik. 4. Penyusunan agenda pembangunan jangka menengah yang inklusif dan berkelanjutan pasca 2030.
Arah Misi 1, 2 3, 4 dan 5	Misi 1 dan 2	Fokus Misi 1, 2 dan 5	Fokus Misi 3, 4 dan 6	Fokus Misi 1 dan 6	Fokus Misi 1 dan 6

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan Visi, Misi, dan tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan di sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka arah kebijakan jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/ komoditas unggulan daerah.
2. Meningkatkan industri berbasis pengolahan yang terintegrasi hulu- hilir.
3. Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil.
4. Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah.

Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan pada strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau yang telah ditetapkan, maka penekanan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dirincikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Arah Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
Kabupaten Sanggau 2025-2029

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
1. Produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir	1.1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/ Komoditas unggulan daerah 1.2. Meningkatkan industri berbasis pengolahan yang terintegrasi hulu- Hilir 1.3. Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil 1.4. Mengembangkan infrastruktur dan sumber daya penunjang industri kecil dan menengah 1.5. Menumbuhkembangkan industri kecil menengah berbasis legalitas dan sertifikasi 1.6. Membangun sistem pendataan yang komprehensif dan terpadu berbasis usaha industri kecil menengah	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis
2. Nilai SAKIP Disperindagkop dan UM	2.1. Meningkatkan sinergitas Program kegiatan dengan pencapaian Kinerja 2.2. Meningkatkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai 2.3. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta pelayanan prima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	

Berdasarkan deskripsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menerah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada perumusan Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

VISI : SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN			
MISI II : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis.	1.1 Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor strategis	1.1.1 Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir	1.1.1.1 Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/komoditas unggulan daerah
			1.1.1.2 Meningkatkan industri berbasis pengolahan yang terintegrasi hulu-hilir
			1.1.1.3 Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil
			1.1.1.4 Mengembangkan infrastruktur dan sumber daya penunjang industri kecil dan menengah
			1.1.1.5 Menumbuhkembangkan industri kecil menengah berbasis legalitas dan sertifikasi
			1.1.1.6 Membangun sistem pendataan yang komprehensif dan terpadu berbasis usaha industri kecil menengah

VISI : SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN**MISI V : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara yang Profesional**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	5.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah	5.1.1 Peningkatan Nilai SAKIP Disperindagkop dan UM	5.1.1.1 Meningkatkan sinergitas Program kegiatan dengan pencapaian Kinerja
			5.1.1.2 Meningkatkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai
			5.1.1.3 Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta pelayanan prima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 – 2029 meliputi target masing-masing program dan kegiatan, disajikan dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 1
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
1. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	1. Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis					Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kabupaten Sanggau
		1. Meningkatnya Produktivitas Perindustrian dan Perdagangan				Nilai perdagangan (milyar rupiah)
		2.Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UM				Persentase Koperasi yang Sehat
						Volume Usaha Koperasi (milyar rupiah)
						Persentase UM yang meningkat Omzetnya
			PROGRAM DAN KOPERASI	PENGAWASAN PEMERIKSAAN	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Pengawasan Koperasi	Koperasi yang diawasi	Jumlah Koperasi yang diawasi
			Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan
			PROGRAM KESEHATAN KOPERASI	PENILAIAN KSP/USP	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase koperasi aktif

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi yang mengikuti RAT	Jumlah Koperasi yang mengikuti RAT
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan
			Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan di bidang Akuntansi bagi Pengurus Koperasi	Pelaku Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaku Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
			Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah pemberdayaan koperasi	Koperasi yang diperdayakan	Jumlah Koperasi yang diperdayakan

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya
			Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Koperasi		Koperasi yang dipulihkan usahanya	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen Informasi Usaha yang terealisasi	Jumlah Dokumen Informasi Usaha yang terealisasi
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Pemulihan Usaha Mikro		Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
			Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro		Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
			Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Unit Usaha Mikro Terdata	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM		Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Mikro	Dokumen Informasi Usaha mikro yang terealisasi	Jumlah Dokumen Informasi Usaha mikro yang terealisasi

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro		Usaha Mikro yang Terasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi
			Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan		Orang yang Difasilitasi	Jumlah yang Difasilitasi
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha		Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi
			Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang tersedia	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan yang terealisasi	Jumlah izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan yang terealisasi

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik		Laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi	Dokumen tanda daftar gudang yang terealisasi	Jumlah dokumen tanda daftar gudang yang terealisasi
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya
			Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan	Sarana distirbusi perdagangan yang terealisasi	Jumlah Sarana distirbusi perdagangan yang terealisasi

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
			Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang, Pengurus dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibina	Realisasi Pedagang, pengurus dan pengelola yang dibina	Jumlah Realisasi Pedagang, pengurus dan pengelola yang dibina
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan		Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disusun	Laporan hasil ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting Usaha yang terealisasi	Jumlah Laporan hasil ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting Usaha yang terealisasi

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
			Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disusun	Dokumen hasil pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terealisasi	Jumlah Dokumen hasil pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terealisasi
			Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
			Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disusun	Laporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang terealisasi	Jumlah Laporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang terealisasi
			Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor Barang

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Ekspor Impor dan Perdagangan Lintas Batas	Dokumen Informasi ekspor impor dan perdagangan lintas batas yang terealisasi	Jumlah Dokumen Informasi ekspor impor dan perdagangan lintas batas yang terealisasi
			Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan
			Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional		Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
			Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal		Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Informasi Alat UTTP Kemetrolgian yang disusun	Dokumen Informasi Alat UTTP Kemetrolgian yang terealisasi	Jumlah Dokumen Informasi Alat UTTP Kemetrolgian yang terealisasi
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
			Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan dalam rangka penyusunan dan evaluasi RPIK	Dokumen laporan yang terealisasi	Jumlah dokumen laporan yang terealisasi
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan yang terealisasi	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan yang terealisasi

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri		Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang memiliki IUI, IPU, IUKI dan IPKI di Kabupaten Sanggau	Informasi Industri yang terealisasi	Jumlah Informasi Industri yang terealisasi
			Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
			Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					
		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISPERINDAGKOP				Nilai SAKIP DISPERINDAGKOP
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		Persentase Capaian Kinerja Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA-SKPD murni th n+1 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen perubahan RKA-SKPD th n dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Dokumen RKA-SKPD murni th n+1 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA-SKPD th n dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan SPIP SKPD (Disperindagkop) Kab. Sanggau Tahun n	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipergunakan dan yang tidak dipergunakan	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun
			Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
			Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum	Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disediakan	Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tabel 4. 2
INDIKATOR, TARGET DAN RENCANA PENDANAAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
	Nilai SAKIP	66.90	66.95		67.50		68.00		68.50		69.00		69.30		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,801,294,291.37		7,957,320,177.20		8,116,466,580.74		8,278,795,912.36		8,444,371,830.60		8,613,259,267.22	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				7,801,294,291.37		7,957,320,177.20		8,116,466,580.74		8,278,795,912.36		8,444,371,830.60		8,613,259,267.22	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian			6,025,315,740.80		6,145,822,055.62		6,268,738,496.73		6,394,113,266.66		6,521,995,532.00		6,652,435,442.64	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penjabaran Konsistensi Program Renstra ke dalam Renja			33,233,929		33,898,607.58		34,576,579.73		35,268,111.33		35,973,473.55		36,692,943.02	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokume n	2 Dokume n	5,437,275	2 Dokume n	5,546,020.50	2 Dokume n	5,656,940.91	2 Dokume n	5,770,079.73	2 Dokume n	5,885,481.32	2 Dokume n	6,003,190.95	Sekretariat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	4,812,917	1 Dokume n	4,909,175.34	1 Dokume n	5,007,358.85	1 Dokume n	5,107,506.02	1 Dokume n	5,209,656.14	1 Dokume n	5,313,849.27	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	4,026,132	1 Dokume n	4,106,654.64	1 Dokume n	4,188,787.73	1 Dokume n	4,272,563.49	1 Dokume n	4,358,014.76	1 Dokume n	4,445,175.05	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	4,724,988	1 Dokume n	4,819,487.76	1 Dokume n	4,915,877.52	1 Dokume n	5,014,195.07	1 Dokume n	5,114,478.97	1 Dokume n	5,216,768.55	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokume n	1 Dokume n	4,807,367	1 Dokume n	4,903,514.34	1 Dokume n	5,001,584.63	1 Dokume n	5,101,616.32	1 Dokume n	5,203,648.65	1 Dokume n	5,307,721.62	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4,891,000	1 Laporan	4,988,820.00	1 Laporan	5,088,596.40	1 Laporan	5,190,368.33	1 Laporan	5,294,175.69	1 Laporan	5,400,059.21	Sekretariat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4,534,250	4 Laporan	4,624,935.00	4 Laporan	4,717,433.70	4 Laporan	4,811,782.37	4 Laporan	4,908,018.02	4 Laporan	5,006,178.38	Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah			5,007,575,592		5,107,727,103.84		5,209,881,645.92		5,314,079,278.84		5,420,360,864.41		5,528,768,081.70	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	3,133,664,148	37 Orang / Bulan	3,196,337,430.96	37 Orang / Bulan	3,260,264,179.58	37 Orang / Bulan	3,325,469,463.17	37 Orang / Bulan	3,391,978,852.43	37 Orang / Bulan	3,459,818,429.48	Sekretariat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokume n	14 Dokume n	1,664,323,341	14 Dokume n	1,697,609,807.82	14 Dokume n	1,731,562,003.98	14 Dokume n	1,766,193,244.06	14 Dokume n	1,801,517,108.94	14 Dokume n	1,837,547,451.12	Sekretariat
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokume n	12 Dokume n	194,760,000	12 Dokume n	198,655,200.00	12 Dokume n	202,628,304.00	12 Dokume n	206,680,870.08	12 Dokume n	210,814,487.48	12 Dokume n	215,030,777.23	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7,797,812	1 Laporan	7,953,768.24	1 Laporan	8,112,843.60	1 Laporan	8,275,100.48	1 Laporan	8,440,602.49	1 Laporan	8,609,414.54	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestere ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestere ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwunanan/ SKPD Semesteran	3 Laporan	3 Laporan	7,030,291	3 Laporan	7,170,896.82	3 Laporan	7,314,314.76	3 Laporan	7,460,601.05	3 Laporan	7,609,813.07	3 Laporan	7,762,009.33	Sekretariat
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipergunakan dan yang tidak dipergunakan			44,385,457		45,273,166.14		46,178,629.46		47,102,202.05		48,044,246.09		49,005,131.01	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokume n	2 Dokume n	2,420,971	2 Dokume n	2,469,390.42	2 Dokume n	2,518,778.23	2 Dokume n	2,569,153.79	2 Dokume n	2,620,536.87	2 Dokume n	2,672,947.61	Sekretariat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokume n	2 Dokume n	19,325,000	2 Dokume n	19,711,500.00	2 Dokume n	20,105,730.00	2 Dokume n	20,507,844.60	2 Dokume n	20,918,001.49	2 Dokume n	21,336,361.52	Sekretariat
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2,239,486	2 Laporan	2,284,275.72	2 Laporan	2,329,961.23	2 Laporan	2,376,560.46	2 Laporan	2,424,091.67	2 Laporan	2,472,573.50	Sekretariat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	20,400,000	2 Laporan	20,808,000.00	2 Laporan	21,224,160.00	2 Laporan	21,648,643.20	2 Laporan	22,081,616.06	2 Laporan	22,523,248.39	Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian			215,264,584		219,569,875.68		223,961,273.19		228,440,498.66		233,009,308.63		237,669,494.80	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas bserta atribut kelengkapannya	55 Paket	55 Paket	0	60 Paket	-	60 Paket	-	60 Paket	-	60 Paket	-	60 Paket	-	Sekretariat
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokume n	1 Dokume n	197,686,774	1 Dokume n	201,640,509.48	1 Dokume n	205,673,319.67	1 Dokume n	209,786,786.06	1 Dokume n	213,982,521.78	1 Dokume n	218,262,172.22	Sekretariat
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah DokumenMonitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokume n	1 Dokume n	17,577,810	1 Dokume n	17,929,366.20	1 Dokume n	18,287,953.52	1 Dokume n	18,653,712.59	1 Dokume n	19,026,786.85	1 Dokume n	19,407,322.58	Sekretariat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pelatihan	15 Orang	15 Orang	0	15 Orang	-	15 Orang	-	15 Orang	-	15 Orang	-	15 Orang	-	Sekretariat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum			235,368,745		240,076,119.90		244,877,642.30		249,775,195.14		254,770,699.05		259,866,113.03	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	9 Paket	68,195,070	9 Paket	69,558,971.40	9 Paket	70,950,150.83	9 Paket	72,369,153.84	9 Paket	73,816,536.92	9 Paket	75,292,867.66	Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13 Paket	13 Paket	96,265,820	13 Paket	98,191,136.40	13 Paket	100,154,959.13	13 Paket	102,158,058.31	13 Paket	104,201,219.48	13 Paket	106,285,243.87	Sekretariat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	26,362,855	4 Paket	26,890,112.10	4 Paket	27,427,914.34	4 Paket	27,976,472.63	4 Paket	28,536,002.08	4 Paket	29,106,722.12	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	Dokumen	0	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	44,545,000	120 Laporan	45,435,900.00	120 Laporan	46,344,618.00	120 Laporan	47,271,510.36	120 Laporan	48,216,940.57	120 Laporan	49,181,279.38	Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disediakan			188,767,318.80		192,542,665.18		196,393,518.48		200,321,388.85		204,327,816.63		208,414,372.96	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	163,800,000	1 Unit	167,076,000.00	1 Unit	170,417,520.00	1 Unit	173,825,870.40	1 Unit	177,302,387.81	1 Unit	180,848,435.56	Sekretariat
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2,741,700.00	1 Unit	2,796,534.00	1 Unit	2,852,464.68	1 Unit	2,909,513.97	1 Unit	2,967,704.25	1 Unit	3,027,058.34	Sekretariat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	22,225,618.80	1 Unit	22,670,131.18	1 Unit	23,123,533.80	1 Unit	23,586,004.48	1 Unit	24,057,724.57	1 Unit	24,538,879.06	Sekretariat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum			169,651,965		173,045,004.30		176,505,904.39		180,036,022.47		183,636,742.92		187,309,477.78	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4,860,000	1 Laporan	4,957,200.00	1 Laporan	5,056,344.00	1 Laporan	5,157,470.88	1 Laporan	5,260,620.30	1 Laporan	5,365,832.70	Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	146,798,115	3 Laporan	149,734,077.30	3 Laporan	152,728,758.85	3 Laporan	155,783,334.02	3 Laporan	158,899,000.70	3 Laporan	162,076,980.72	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	17,993,850	1 Laporan	18,353,727.00	1 Laporan	18,720,801.54	1 Laporan	19,095,217.57	1 Laporan	19,477,121.92	1 Laporan	19,866,664.36	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara			131,068,150		133,689,513.00		136,363,303.26		139,090,569.33		141,872,380.71		144,709,828.33	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharaan dan dibayar Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30,010,000	1 Unit	30,610,200.00	1 Unit	31,222,404.00	1 Unit	31,846,852.08	1 Unit	32,483,789.12	1 Unit	33,133,464.90	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jmlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	71,976,150	2 Unit	73,415,673.00	2 Unit	74,883,986.46	2 Unit	76,381,666.19	2 Unit	77,909,299.51	2 Unit	79,467,485.50	Sekretariat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	51 Unit	45 Unit	29,082,000	51 Unit	29,663,640.00	51 Unit	30,256,912.80	51 Unit	30,862,051.06	51 Unit	31,479,292.08	51 Unit	32,108,877.92	Sekretariat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	0	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	Sekretariat
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2.23	1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7.28	5.25		5.45		5.89		6.33		6.77		7.21		
	Persentase Koperasi Aktif	27.35	18		20		25		30		35		35		
	Persentase kenaikan Kelas Usaha Mikro	0.57	1		1.75		1.78		1.81		1.84		1.87		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi			103,320,444.67		105,386,853.56		107,494,590.63		109,644,482.45		111,837,372.10		114,074,119.54	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Pengawasan Koperasi			103,320,444.67		105,386,853.56		107,494,590.63		109,644,482.45		111,837,372.10		114,074,119.54	
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	90 Unit Usaha	-	90 Unit Usaha	-	90 Unit Usaha	-	90 Unit Usaha	-	90 Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	90 Unit Usaha	30 Unit Usaha	103,320,444.67	35 Unit Usaha	105,386,853.56	35 Unit Usaha	107,494,590.63	35 Unit Usaha	109,644,482.45	35 Unit Usaha	111,837,372.10	35 Unit Usaha	114,074,119.54	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat			16,885,059		17,222,760.18		17,567,215.38		17,918,559.69		18,276,930.89		18,642,469.50	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			16,885,059		17,222,760.18		17,567,215.38		17,918,559.69		18,276,930.89		18,642,469.50	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	40 Unit Usaha	16,885,059	20 Unit Usaha	17,222,760.18	20 Unit Usaha	17,567,215.38	20 Unit Usaha	17,918,559.69	20 Unit Usaha	18,276,930.89	20 Unit Usaha	18,642,469.50	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	40 Unit Usaha	-	40 Unit Usaha	-	40 Unit Usaha	-	40 Unit Usaha	-	40 Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus dan Pengawas Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro terlatih			-		-		-		-		-		-	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan di bidang Akuntansi bagi Pengurus Koperasi			-		-		-		-		-		-	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang	0 Orang	0	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			-		-		-		-		-		-	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah pemberdayaan koperasi			-		-		-		-		-		-	
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			1,655,773,046.90		1,688,888,507.84		1,722,666,277.99		1,757,119,603.55		1,792,261,995.63		1,828,107,235.54	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Kecil dan Menengah			1,655,773,046.90		1,688,888,507.84		1,722,666,277.99		1,757,119,603.55		1,792,261,995.63		1,828,107,235.54	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0 Unit Usaha	Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Mnerima Pembinaan dan Pemdampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	30 Unit Usaha	174,824,445.10	44 Unit Usaha	178,320,934.00	44 Unit Usaha	181,887,352.68	44 Unit Usaha	185,525,099.74	44 Unit Usaha	189,235,601.73	44 Unit Usaha	193,020,313.77	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0 Orang	0 Orang	0	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	18,510,595.05	28 Unit Usaha	18,880,806.95	28 Unit Usaha	19,258,423.09	28 Unit Usaha	19,643,591.55	28 Unit Usaha	20,036,463.38	28 Unit Usaha	20,437,192.65	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha	90 Unit Usaha	25,499,512.05	120 Unit Usaha	26,009,502.29	120 Unit Usaha	26,529,692.34	120 Unit Usaha	27,060,286.18	120 Unit Usaha	27,601,491.91	120 Unit Usaha	28,153,521.75	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0 Orang	50 Orang	1,436,938,494.70	60 Orang	1,465,677,264.59	60 Orang	1,494,990,809.89	60 Orang	1,524,890,626.08	60 Orang	1,555,388,438.61	60 Orang	1,586,496,207.38	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro			-		-		-		-		-		-	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Mikro			-		-		-		-		-		-	
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	0 Orang	0 Orang	0	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3,057,227,750		3,118,372,305.29		3,180,739,751.39		3,244,354,546.42		3,309,241,637.35		3,375,426,470.09	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2,114,549,345		2,156,840,331.98		2,199,977,138.62		2,243,976,681.39		2,288,856,215.02		2,334,633,339.32	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Gudang yang Teregistrasi			21,759,035		22,194,215.70		22,638,100.01		23,090,862.01		23,552,679.25		24,023,732.84	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang tersedia			-		-		-		-		-		-	
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1Lapora n	0 Laporan	0	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	Bidang Perdaganga n
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi			21,759,035		22,194,215.70		22,638,100.01		23,090,862.01		23,552,679.25		24,023,732.84	
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokume n	1 Dokume n	21,759,035	1 Dokume n	22,194,215.70	1 Dokume n	22,638,100.01	1 Dokume n	23,090,862.01	1 Dokume n	23,552,679.25	1 Dokume n	24,023,732.84	Bidang Perdaganga n
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Daya Tampung Pasar terhadap Pedagang			1,465,475,440.78		1,494,784,949.60		1,524,680,648.59		1,555,174,261.56		1,586,277,746.79		1,618,003,301.73	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan			1,363,793,090.78		1,391,068,952.60		1,418,890,331.65		1,447,268,138.28		1,476,213,501.05		1,505,737,771.07	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	1,363,793,090.78	3 Unit	1,391,068,952.60	3 Unit	1,418,890,331.65	3 Unit	1,447,268,138.28	3 Unit	1,476,213,501.05	3 Unit	1,505,737,771.07	Bidang Pasar
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang, Pengurus dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina			101,682,350		103,715,997.00		105,790,316.94		107,906,123.28		110,064,245.74		112,265,530.66	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokume n	20 Dokume n	101,682,350	20 Dokume n	103,715,997.00	20 Dokume n	105,790,316.94	20 Dokume n	107,906,123.28	20 Dokume n	110,064,245.74	20 Dokume n	112,265,530.66	Bidang Pasar
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			212,736,878		216,991,615.56		221,331,447.87		225,758,076.83		230,273,238.37		234,878,703.13	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disusun			39,221,268		40,005,693.36		40,805,807.23		41,621,923.37		42,454,361.84		43,303,449.08	
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	0 laporan	1 laporan	39,221,268	1 laporan	40,005,693.36	1 laporan	40,805,807.23	1 laporan	41,621,923.37	1 laporan	42,454,361.84	1 laporan	43,303,449.08	Bidang Perdaganga n

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disusun			173,515,610		176,985,922.20		180,525,640.64		184,136,153.46		187,818,876.53		191,575,254.06	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	165,523,610	1 laporan	168,834,082.20	1 laporan	172,210,763.84	1 laporan	175,654,979.12	1 laporan	179,168,078.70	1 laporan	182,751,440.28	Bidang Pasar
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	7,992,000	1 laporan	8,151,840.00	1 laporan	8,314,876.80	1 laporan	8,481,174.34	1 laporan	8,650,797.82	1 laporan	8,823,813.78	Bidang Pasar
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disusun			-		-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0 laporan	0 laporan	0	laporan	-	laporan	-	laporan	-	laporan	-	laporan	-	Bidang Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor			30,679,079		31,292,660.58		31,918,513.79		32,556,884.07		33,208,021.75		33,872,182.18	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Ekspor Impor dan Perdagangan lintas Batas			30,679,079		31,292,660.58		31,918,513.79		32,556,884.07		33,208,021.75		33,872,182.18	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Bidang Perdagangan
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	30,679,079	2 Pelaku Usaha	31,292,660.58	2 Pelaku Usaha	31,918,513.79	2 Pelaku Usaha	32,556,884.07	2 Pelaku Usaha	33,208,021.75	2 Pelaku Usaha	33,872,182.18	Bidang Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat UTTP yang ditera dan diter ulang			383,898,912.30		391,576,890.55		399,408,428.36		407,396,596.92		415,544,528.86		423,855,419.44	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Informasi Alat UTTP Kemetrolagian yang disusun			383,898,912.30		391,576,890.55		399,408,428.36		407,396,596.92		415,544,528.86		423,855,419.44	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	240 Unit	240 Unit	356,011,070.25	250 Unit	363,131,291.66	250 Unit	370,393,917.49	250 Unit	377,801,795.84	250 Unit	385,357,831.75	250 Unit	393,064,988.39	Bidang Perdagangan
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	40 Orang	40 Orang	27,887,842.05	40 Orang	28,445,598.89	40 Orang	29,014,510.87	40 Orang	29,594,801.09	40 Orang	30,186,697.11	40 Orang	30,790,431.05	Bidang Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				942,678,405		961,531,973.30		980,762,612.77		1,000,377,865.03		1,020,385,422.33		1,040,793,130.77	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri			929,633,911		948,226,589.22		967,191,121.00		986,534,943.42		1,006,265,642.29		1,026,390,955.14	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan dalam rangka penyusunan dan evaluasi RPIK			929,633,911		948,226,589.22		967,191,121.00		986,534,943.42		1,006,265,642.29		1,026,390,955.14	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokume n	0 Dokume n	0	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Bidang Perindustri an
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0 Dokume n	0 Dokume n	0	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Bidang Perindustri an
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokume n	1 Dokume n	169,815,055	1 Dokume n	173,211,356.10	1 Dokume n	176,675,583.22	1 Dokume n	180,209,094.89	1 Dokume n	183,813,276.78	1 Dokume n	187,489,542.32	Bidang Perindustri an
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokume n	1 Dokume n	237,454,743	1 Dokume n	242,203,837.86	1 Dokume n	247,047,914.62	1 Dokume n	251,988,872.91	1 Dokume n	257,028,650.37	1 Dokume n	262,169,223.38	Bidang Perindustri an
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokume n	2 Dokume n	522,364,113	2 Dokume n	532,811,395.26	2 Dokume n	543,467,623.17	2 Dokume n	554,336,975.63	2 Dokume n	565,423,715.14	2 Dokume n	576,732,189.44	Bidang Perindustri an
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0 Dokume n	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Bidang Perindustri an
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang dibina			-		-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan			-		-		-		-		-		-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokume n	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Dokume n	-	Bidang Perindustri an

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	Dokumen	0	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Bidang Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi Industri			13,044,494.20		13,305,384.08		13,571,491.77		13,842,921.60		14,119,780.03		14,402,175.63	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kabupaten Sanggau			13,044,494.20		13,305,384.08		13,571,491.77		13,842,921.60		14,119,780.03		14,402,175.63	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	0 Dokumen	0	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Bidang Perindustrian
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	13,044,494.20	2 Dokumen	13,305,384.08	2 Dokumen	13,571,491.77	2 Dokumen	13,842,921.60	2 Dokumen	14,119,780.03	2 Dokumen	14,402,175.63	Bidang Perindustrian
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	okumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Bidang Perindustrian
				10,858,522,041.65		11,075,692,482.48		11,297,206,332.13		11,523,150,458.78		11,753,613,467.95		11,988,685,737.31	

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program-program unggulan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, mengatasi isu strategis dan memenuhi janji kampanye politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Selain itu, dalam menyusun program prioritas pembangunan daerah tentu juga harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Barat. Mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat dipengaruhi keberhasilan program-program di provinsi maupun di kabupaten/kota, sehingga dibutuhkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Tabel 4.3 berikut memuat daftar Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 3
Daftar Program / Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Program/Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik Peningkatan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan dan profesionalisme ASN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	
			- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	
			- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan Peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	

			Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			8. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	

			- Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
			- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			9. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			- Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			10. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			-Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			- Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			- Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			11. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			12. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
			13. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			14. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			15. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	

Berdasarkan tabel 4.3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau memiliki total 15 Program dan 26 Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029

dalam mewujudkan Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik, Peningkatan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan dan profesionalisme ASN serta Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan, Peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Melalui Program dan Kegiatan tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana program dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 terdiri dari program-program yang menunjang visi dan misi Bupati terpilih.

Program ini mencakup urusan perindustrian, urusan perdagangan dan urusan Koperasi serta program-program penunjang.

1. Urusan perindustrian terdiri dari 3 (tiga) program yaitu :
 - 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
 - 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
 - 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
2. Urusan perdagangan terdiri dari 5 (lima) program yaitu :
 - 1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
 - 4) Program Pengembangan Ekspor.
 - 5) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.
2. Urusan Koperasi terdiri dari 2 (dua) program yaitu :
 - 1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.
 - 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
 - 3) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.
 - 4) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.
 - 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM))
 - 6) Program Pengembangan UMKM

Adapun program-program penunjang urusan Pemerintahan Daerah disajikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau
Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sanggau Tahun 2025-2029

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN DPPKUM	SASARAN DPPKUM	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
				INDIKATOR TUJUAN								
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah			1.1 Nilai SAKIP	66.90	66.95	67.50	68	68.50	69	69.30	69.30
			INDIKATOR SASARAN									
		1. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah										

			1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISPERINDAGKOP	1.1.1. Nilai SAKIP DISPERINDAGKOP	66.90	66.95	67.50	68	68.50	69	69.30	69.30
				INDIKATOR TUJUAN								
2.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis			2.1 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23
				2.2 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28
				2.3 Persentase Koperasi Aktif	27.35	27.50	28.00	29.00	30.00	35.00	35.00	35.00
				2.4 Persentase Kenaikan Kelas UM	0.57	1	1.75	1.78	1.81	1.84	1.87	1.87
			INDIKATOR SASARAN									
		2. Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis										
			2.1.Meningkatnya Produktivitas Perindustrian dan Perdagangan	2.1.1.Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kabupaten Sanggau	15.98	17.30	17.47	18.22	18.96	19.71	20.45	20.45
				2.1.2.Nilai perdagangan (milyar rupiah)	3,116.16	3,140.56	3,187.35	3,203.14	3,318.93	3,434.73	3,477.92	3,477.92

			2.2.Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UM	2.2.1.Persentase Koperasi yang Sehat	2.00	2.50	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00	15.00
				2.2.2.Volume Usaha Koperasi (milyar rupiah)	696	696	699	703	706	710	713	713
				2.2.3.Persentase UM yang meningkat Omzetnya	0.87	0.93	0.95	0.98	1.02	1.07	1.13	1.13

Tabel 4. 5 Indikator, Target dan Rencana Pendanaan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
	Nilai SAKIP	66.90	66.95	67.50	68.00	68.50	69.00	69.30	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Ketersediaan Layanan Umum Penjunjang Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian								
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penjabaran Konsistensi Program Renstra ke dalam Renja								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sekretariat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	Sekretariat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	Sekretariat
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ SKPD Semesteran	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Sekretariat
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipergunakan dan yang tidak dipergunakan								
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Sekretariat
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Sekretariat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Sekretariat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	55 Paket	55 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	60 Paket	Sekretariat
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sekretariat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pelatihan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	Sekretariat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	Sekretariat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	Sekretariat
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disediakan								
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Sekretariat
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Sekretariat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Sekretariat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sekretariat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jmlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Sekretariat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	51 Unit	45 Unit	51 Unit	51 Unit	51 Unit	51 Unit	51 Unit	Sekretariat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Sekretariat
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	
	Persentase Koperasi Aktif	27.35	27.5	28	29	30	35	35	
	Persentase kenaikan Kelas Usaha Mikro	0.57	1	1.75	1.78	1.81	1.84	1.87	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi								
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Pengawasan Koperasi								
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	90 Unit Usaha	30 Unit Usaha	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi								
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	40 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus dan Pengawas Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro terlatih								
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan di bidang Akuntansi bagi Pengurus Koperasi								
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang	0 Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi								
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah pemberdayaan koperasi								
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Kecil dan Menengah								
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0 Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Mnerima Pembinaan dan Pemdampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	30 Unit Usaha	44 Unit Usaha	44 Unit Usaha	44 Unit Usaha	44 Unit Usaha	44 Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0 Orang	0 Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	28 Unit Usaha	28 Unit Usaha	28 Unit Usaha	28 Unit Usaha	28 Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha	90 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0 Orang	50 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro								
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Mikro								
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Unit Usaha	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	0 Orang	0 Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Gudang yang Teregistrasi								
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang tersedia								
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Bidang Perdagangan
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Daya Tampung Pasar terhadap Pedagang								
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan								
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Bidang Pasar
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang, Pengurus dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina								
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	Bidang Pasar
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting								
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disusun								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	0 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Bidang Perdagangan
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disusun								
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Bidang Pasar
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Bidang Pasar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disusun								
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0 laporan	0 laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	Bidang Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor								
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Ekspor Impor dan Perdagangan lintas Batas								
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Bidang Perdagangan
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	Bidang Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat UTTP yang ditera dan diter ulang								
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Informasi Alat UTTP Kemetrolagian yang disusun								
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	240 Unit	240 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	Bidang Perdagangan
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	Bidang Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri								
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan dalam rangka penyusunan dan evaluasi RPIK								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Bidang Perindustrian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Bidang Perindustrian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Perindustrian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bidang Perindustrian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Bidang Perindustrian
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang dibina								
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Bidang Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi Industri								
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kabupaten Sanggau								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	6	8	10	12	14	18
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Bidang Perindustrian
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Bidang Perindustrian
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Bidang Perindustrian

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sanggau serta prioritas pembangunan nasional dan daerah. Kesimpulan dari Rencana Strategis ini mencakup beberapa hal penting :

1. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 memuat 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
4. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 merumuskan 15 program, 26 kegiatan, dan 76 sub kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025–2029, yaitu terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau menekankan pentingnya kolaborasi dengan Perangkat Daerah

lainnya, perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perencanaan pembangunan partisipatif dengan berbasis data dan bukti

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah prinsip-prinsip, tata cara dan pedoman teknis yang menjadi dasar dalam menjalankan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau selama periode lima tahun. Kaidah ini menjamin agar pelaksanaan Rencana Strategis dapat berjalan sistematis, terukur, akuntabel dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Berikut adalah kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029:

1. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025 2029 menjadi pedoman bagi seluruh ASN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Turunan Rencana Strategis berupa Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 hingga Tahun 2029 harus konsisten dengan tujuan, sasaran, indikator dan target yang ditetapkan. Terdapat tahun transisi 2030 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2030;
3. Alokasi pendanaan disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
4. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, ketercapaian kinerja dan perbaikan kebijakan dan perencanaan periode berikutnya;

5. Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 bersifat dinamis dan dapat disesuaikan jika terdapat perubahan kebijakan nasional, kondisi darurat atau kebutuhan strategis lainnya. Penyesuaian dilakukan melalui mekanisme revisi atau penajaman program dan kegiatan.